



**GOVERNMENT OF INDONESIA
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN SETTLEMENTS**

**SUPPORT STUDY FOR MASTER
PLANNING FOR WATER SUPPLY
SUBSECTOR POLICY**

**NOTA PENJELASAN
STRATEGY PLANNING
SUBSEKTOR AIR BERSIH
PADA REPELITA - V**

**LIBRARY
INTERNATIONAL REFERENCE CENTRE
FOR COMMUNITY WATER SUPPLY AND
SANITATION (IRC)**

**P.T. INDAH KARYA Consulting Engineers
in association with
SIR M. MACDONALD & PARTNERS ASIA
DHV Consulting Engineers
PT. BROMO MASARANG Consultants**

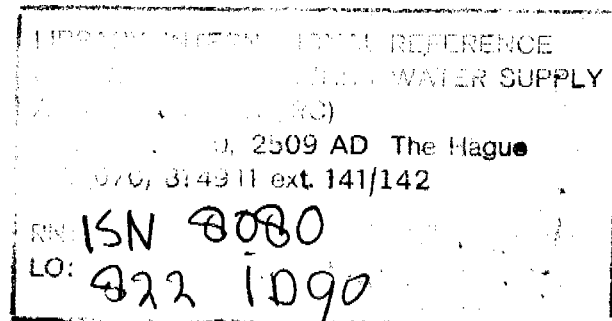
822-ID 90-8080



**GOVERNMENT OF INDONESIA
MINISTRY OF PUBLIC WORKS
DIRECTORATE GENERAL OF HUMAN SETTLEMENTS**

SUPPORT STUDY FOR MASTER PLANNING FOR WATER SUPPLY SUBSECTOR POLICY

**NOTA PENJELASAN
STRATEGY PLANNING
SUBSEKTOR AIR BERSIH
PADA REPELITA - V**



**P.T. INDAH KARYA Consulting Engineers
in association with
SIR M. MACDONALD & PARTNERS ASIA
DHV Consulting Engineers
PT. BROMO MASARANG Consultants**

DAFTAR ISI

I.	PENDAHULUAN	1
	1.1. Dasar Pemikiran	1
	1.2. Tujuan Pembuatan Study	1
II.	HASIL-HASIL YANG DICAPAI SELAMA PELITA IV	2
	2.1. Kuantitatip	2
	2.2. Kualitatip	3
	2.3. Masalah-Masalah Implementasi	3
III.	MASUKAN-MASUKAN PENTING DARI PELITA IV	6
	3.1. Kriteria Tingkat Pelayanan Air	6
	3.2. Tingkat Kebutuhan Air	6
	3.3. Tingkat Kebocoran Air	7
	3.4. Pembangunan Unit Produksi & Distribusi	7
	3.5. Realisasi Konsep Sistim BNA	8
IV.	KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN SUBSECTOR AIR BERSIH PADA PADA REPELITA V	8
	4.1. Kebijakan Umum	8
	4.2. Kebijakan Teknis	12
	4.3. Kebijakan Operasionil	15
V.	STRATEGY PEMBANGUNAN SUBSECTOR AIR BERSIH PADA REPELITA V	17
	5.1. Umum	17
	5.2. Strategi Fisik	17
	5.3. Strategi Bidang Institusi	19
	5.4. Strategi Bidang Finansil	20
	5.5. Penyertaan Modal Swasta	22
VI	INDIKASI PROGRAM & SASARAN	23
	6.1. Umum	23
	6.2. Sasaran/Target	23
	6.3. Tolok Ukur Pencapaian Target	25
	6.4. Rencana Pembiayaan	26

Lampiran.

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2-1	: Kebutuhan air bersih daerah perkotaan	4
GAMBAR 2-2	: Kebutuhan air bersih daerah semi perkotaan ...	5
GAMBAR 3-1	: Kebutuhan domestik	8
GAMBAR 3-2	: Kebutuhan non domestik	9
GAMBAR 3-3	: Kebocoran air	10
GAMBAR 6-1	: Investasi dalam biaya O & M pada Repelita V ..	27

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN I	: Daftar Program Repelita V Sub Sector Air Bersih dengan dana bantuan luar negeri.
LAMPIRAN II	: Daftar kota - kota Luncuran PELITA IV.
LAMPIRAN III	: Daftar Kota - kota yang pendanaannya diperkirakan segera disetujui (PIPELINE).
LAMPIRAN IV	: Daftar Kota - kota yang pendanaannya dalam proses pengusulan (INDICATIVE).

**RINGKASAN NOTA PENJELASAN
STRATEGI PLANNING SUBSECTOR
AIR BERSIH PADA REPELITA V**

I. PENDAHULUAN :

1.1. Dasar Pemikiran

Pelaksanaan Pembangunan dalam bidang Air Bersih telah dirasakan mempunyai potensi yang besar, tidak saja meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam hal kesehatan, tetapi berpartisipasi pula dalam meningkatkan penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.

Menghadapi Repelita V mendatang maka kebijaksanaan Subsector Air Bersih selain berpedoman pengalaman-pengalaman selama melaksanakan kebijaksanaan Pelita IV, dilandasi pula oleh makna butir-butir GBHN - 1988 yang mencakup sektor-sektor perumahan dan pemukiman; sektor industri dan pariwisata.

1.2. Tujuan Pembuatan Study.

Study Penunjang Rancangan Induk kebijaksanaan Subsector Air Bersih dilaksanakan dalam rangka menyusun program kebijaksanaan air bersih dalam Repelita V sesuai dengan pengarahannya Direktorat Air Bersih maupun Tim Koordinasi Pembangunan Perkotaan. Hasil Study ini terutama ditujukan untuk memberikan masukan-masukan tentang :

- (a). Perkiraan target yang dapat dicapai Subsector Air Bersih selama Repelita V beserta tingkat investasinya berdasarkan kebutuhan yang nyata.
- (b). Perkiraan faktor-faktor yang dapat membantu pendistribusian total dana Subsector yang wajar yang mencakup biaya-biaya pembangunan, operasi dan pemeliharaan.

Study ini mengkaji juga beberapa pertimbangan terhadap strategi pengembangan daerah Semi Urban (Semi perkotaan), walaupun demikian penekanan prioritas pengembangan Strategi lebih diutamakan untuk sistim perkotaan (Urban).

II. HASIL-HASIL YANG DICAPAI SELAMA PELITA IV

2.1. Kuantitatif :

Target Pemerintah Indonesia dalam Pelita IV adalah dengan memberikan kemudahan untuk memperoleh pelayanan air bersih yang memadai kepada 75% penduduk perkotaan (penduduk diatas 20.000 jiwa) dan 60% penduduk semi perkotaan.

Tingkat pelayanan tersebut diatas dipandang belum dapat dicapai dikarenakan keterbatasan dana pembangunan maupun pertambahan penduduk yang terus meningkat dengan cepat.

Walaupun demikian kemajuan-kemajuan yang berarti telah dicapai selama Pelita IV yaitu dengan meningkatnya jumlah sambungan rumah maupun kran umum yang telah dibangun.

Informasi yang diperoleh menunjukkan bahwa sistim Penyediaan Air Bersih telah menyediakan sarana jaringan distribusi penduduk perkotaan sebesar :

- (a). 1.430.000 Sambungan Rumah
- (b). 16.000 Kran Umum

Hasil survai menyimpulkan bahwa setiap sambungan rumah rata-rata telah dikonsumsi 7 (tujuh) orang dan setiap Kran Umum rata-rata dikonsumsi kurang lebih 100 (seratus) orang.

Berdasarkan data tersebut maka jumlah penduduk perkotaan yang telah dilayani sistim perpipaan diperkirakan sebesar 11,4 juta jiwa, dan pada akhir Pelita IV diperkirakan meningkat sampai dengan 13,2 juta jiwa.

Selain dari pada itu dari pengamatan yang dilakukan terhadap kemudahan penduduk untuk memperoleh alternatif sumber air bersih lain yang memadai misalnya dengan membuat sumur pipa sendiri ataupun usaha-usaha kolektif lainnya, sejumlah kurang lebih 15 juta jiwa penduduk diperkirakan berada pada kategori ini.

Pengamatan tersebut ditunjang pula oleh data curah hujan dan data kepadatan penduduk perkotaan yang satu sama lain erat hubungannya dengan cadangan air tanah dan kemungkinan pencemaran terhadap air tanah serta tingkat keasinan (salinity) dari pada air tanah.

Dengan demikian jumlah penduduk yang dipandang telah memperoleh kemudahan untuk mendapat pelayanan air bersih (melalui sistim perpipaan + mempunyai alternatif sendiri), sampai akhir Pelita IV diperkirakan mencapai 28,2 juta jiwa. Oleh karena itu dari jumlah penduduk perkotaan yang diperkirakan akan mencapai 49,5 juta jiwa pada akhir Pelita IV, sebesar $(49,5 - 28,2) = 21,3$ juta jiwa merupakan sisa jumlah penduduk perkotaan yang belum dapat dilayani melalui sistim perpipaan pada periode tersebut (Perhatikan Gambar : 2-1).

Pada periode Repelita V, sisa jumlah penduduk perkotaan yang belum dapat dilayani melalui sistim perpipaan diperkirakan akan menjadi lebih besar, bilamana tingkat pelayanan Air Bersih tetap lebih rendah dari pada tingkat pertumbuhan penduduk.

Gambar 2-2 menggambarkan situasi Sistim Penyediaan Air Bersih untuk daerah semi perkotaan yang diproyeksikan berdasarkan pendekatan-pendekatan yang sama dengan daerah perkotaan.

2.2. Kualitatif :

Kualitas pencapaian target pada dasarnya sulit dihitung secara spesifik.

Walaupun demikian, target kriteria kualitas air yang dikembangkan Cipta Karya, dipandang cukup memadai untuk dipergunakan sebagai dasar merencanakan Sistim Penyediaan Air Bersih.

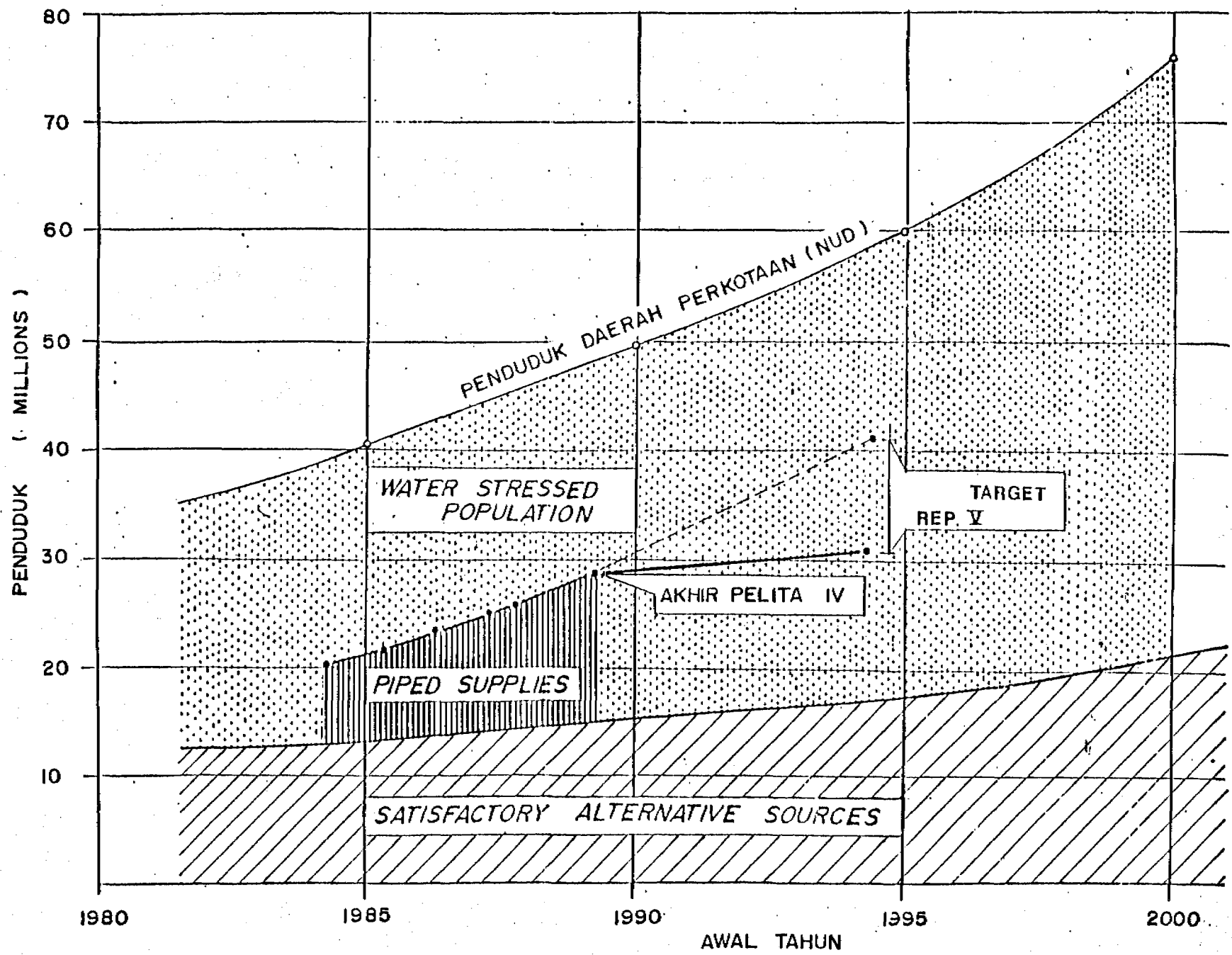
Informasi lapangan dan sumber-sumber data lainnya membuktikan bahwa dalam banyak hal target tersebut akan dapat dicapai.

Walaupun demikian ada beberapa kasus yang perlu mendapat perhatian misalnya keadaan sistim distribusi yang selalu berada di bawah tekanan standar.

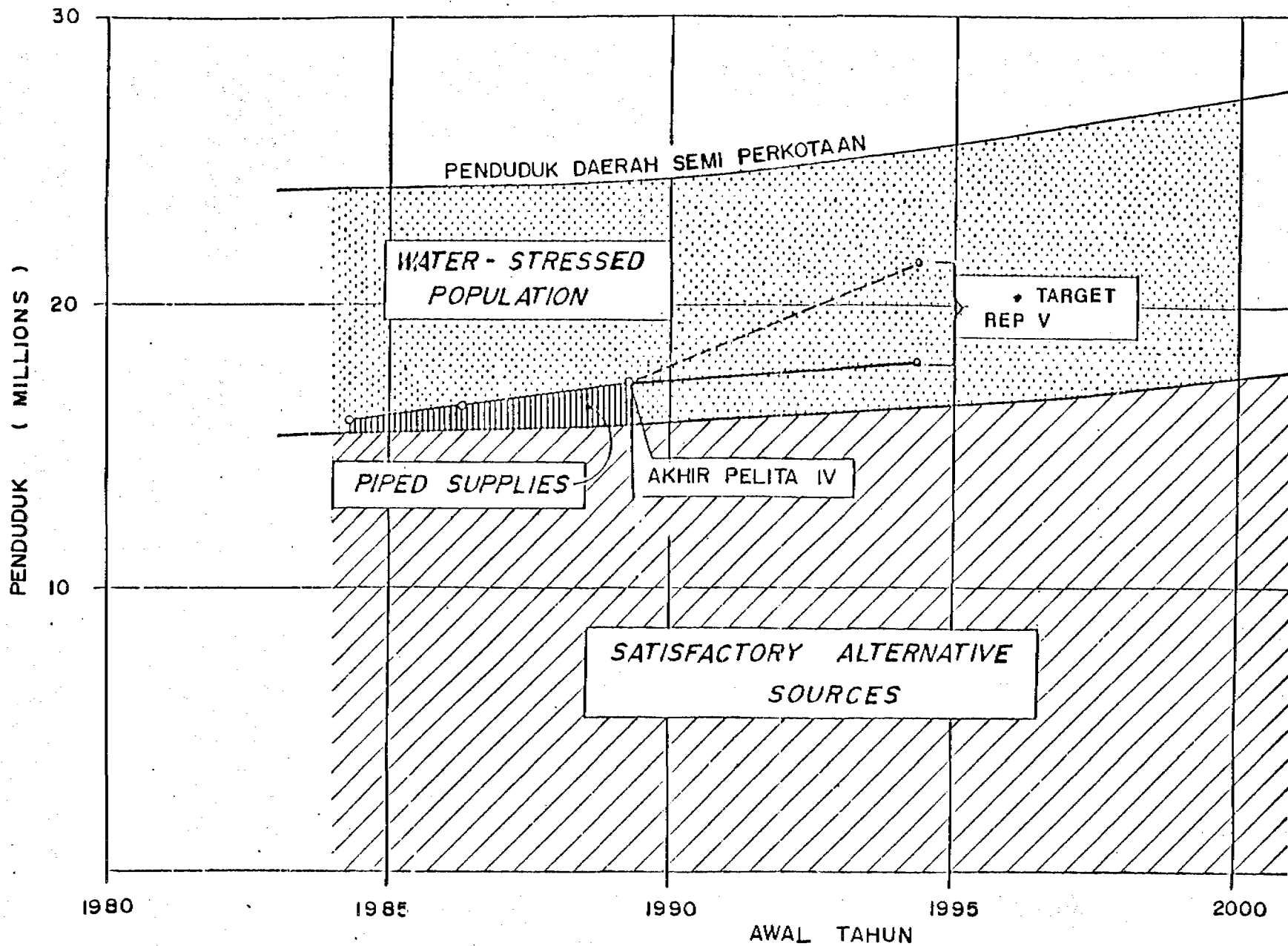
Pengoperasian pada tekanan rendah atau adanya penjadwalan sistim distribusi air bersih, pada dasarnya dipandang tidak normal dan dapat memperbesar penurunan kualitas air dalam sistim distribusi.

2.3. Masalah-masalah Implementasi :

Secara umum implementasi suatu program sangat dipengaruhi oleh ketersediaan Dana Pembangunan. Dana bantuan Pemerintah Pusat (Grant) ke daerah-daerah hanya terbatas sampai tingkat kebutuhan 60 l/c/d untuk tingkat pelayanan 60% penduduk perkotaan. Hal ini berarti bahwa kebutuhan diatas 60 l/c/d harus dibiayai sendiri oleh Pemerintah Daerah misalnya melalui pinjaman lunak dan lain-lain.



KEBUTUHAN AIR BERSIH
DAERAH PERKOTAAN



KEBUTUHAN AIR BERSIH
DAERAH SEMI PERKOTAAN

Sementara itu, hampir sebagian besar Pemerintah Daerah penerima grant untuk membangun Sistem Penyediaan Air Bersih belum memberi prioritas untuk memobilisasi sebagian dana daerah untuk menunjang program tersebut. Akibatnya Dana pusat yang telah ditanam dipandang tidak efisien dan efektif.

Selain daripada itu, banyak proyek-proyek yang dibiayai dana luar Negeri tidak dapat diselesaikan pada waktunya, karena terbatasnya dana pendamping yang berkisar antara 20-40 % dari seluruh biaya pembangunan.

Dampak lain yang dirasakan adalah makin besarnya komitmen fee yang harus dibayar akibat penyerapan loan yang tidak sesuai rencana.

III. MASUKAN-MASUKAN PENTING DARI PELITA IV

3.1. Kriteria Tingkat Pelayanan Air :

Hasil Study menunjukkan bahwa kriteria perbandingan tingkat pelayanan air bersih sebesar 50% melalui sambungan rumah dan 50% melalui kran umum tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

Pengamatan terhadap sebagian besar Perusahaan Air Minum, menyimpulkan bahwa keadaan sebenarnya mendekati perbandingan 80% penduduk dilayani melalui sambungan rumah dan 20 % penduduk dilayani melalui Kran Umum.

Keadaan tersebut memberikan dampak terhadap perhitungan kebutuhan air serta biaya sistem.

3.2. Tingkat Kebutuhan Air :

Kriteria tingkat kebutuhan air bersih yang biasa dinyatakan dalam l/c/d, baik untuk Domestic maupun Non-Domestic ditetapkan bervariasi berdasarkan kategori penduduk kota.

Hasil pengamatan lapangan menunjukkan bahwa kriteria tingkat kebutuhan air untuk kota-kota dengan penduduk kurang dari pada 100.000 jiwa, lebih kecil dari kebutuhan yang nyata. Sedangkan untuk kota-kota dengan penduduk lebih besar dari pada 100.000 jiwa lebih besar dari kebutuhan nyata (Perhatikan Gambar 3-1 dan Gambar 3-2).

Informasi yang dapat dipelajari dari gambar 3-1 menunjukkan bahwa tingkat kebutuhan untuk katagori katagori kota lebih kecil daripada 20.000 jiwa adalah 100 l/c/d. Sedangkan untuk katagori kota diatas 1.000.000 jiwa adalah 190 l/c/d.

Adapun kriteria yang berlaku untuk katagori kota tersebut adalah 60 l/c/d dan 210 l/c/d.

Perhitungan menyeluruh terhadap kebutuhan Subsector air bersih tampaknya tidak menunjukkan adanya dampak yang berarti tetapi akan menimbulkan dampak yang besar bila perhitungannya dilakukan terhadap sistim dalam satu kota.

3.3. Tingkat Kebocoran Air :

Pengamatan lain yang dilakukan adalah terhadap tingkat kebocoran air yang umumnya berada diatas kriteria disain sebesar 20% dari kapasitas produksi.

Data yang ada menunjukkan angka rata-rata sebesar 35% dari kapasitas produksi (Perhatikan Gambar 3-3).

Hal tersebut menyimpulkan bahwa perhatian perlu lebih ditekankan kepada pengawasan kebocoran dan rehabilitasi sistim dalam Repelita V.

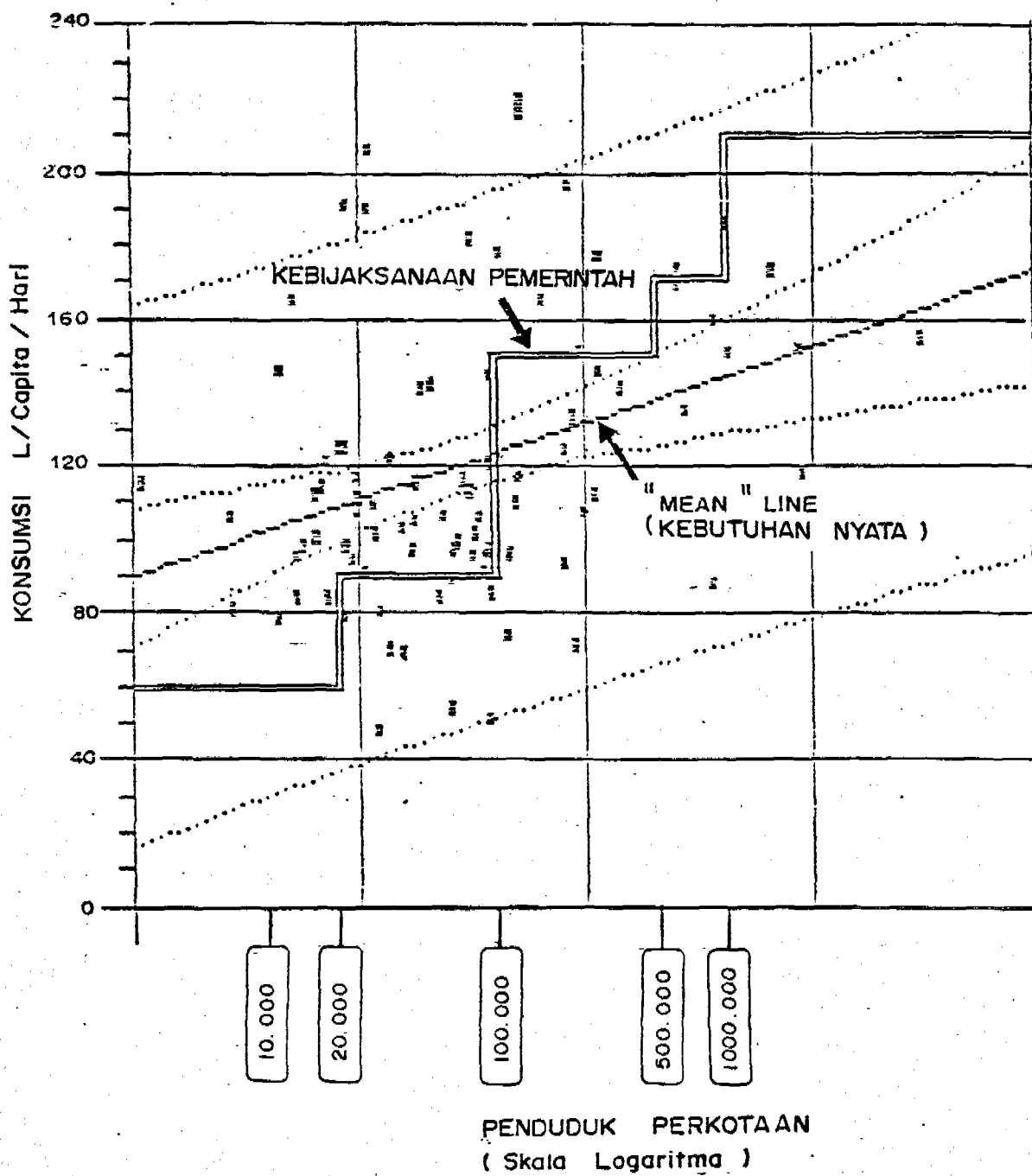
3.4. Pembangunan Unit Produksi & Distribusi :

Pembangunan unit-unit produksi dan sebagian komponen distribusi (pipa-pipa induk) selama Pelita III dan Pelita IV adalah untuk merangsang Pemerintah Daerah agar ikut berpartisipasi dalam melengkapi bagian lain jaringan distribusi yang belum dibangun.

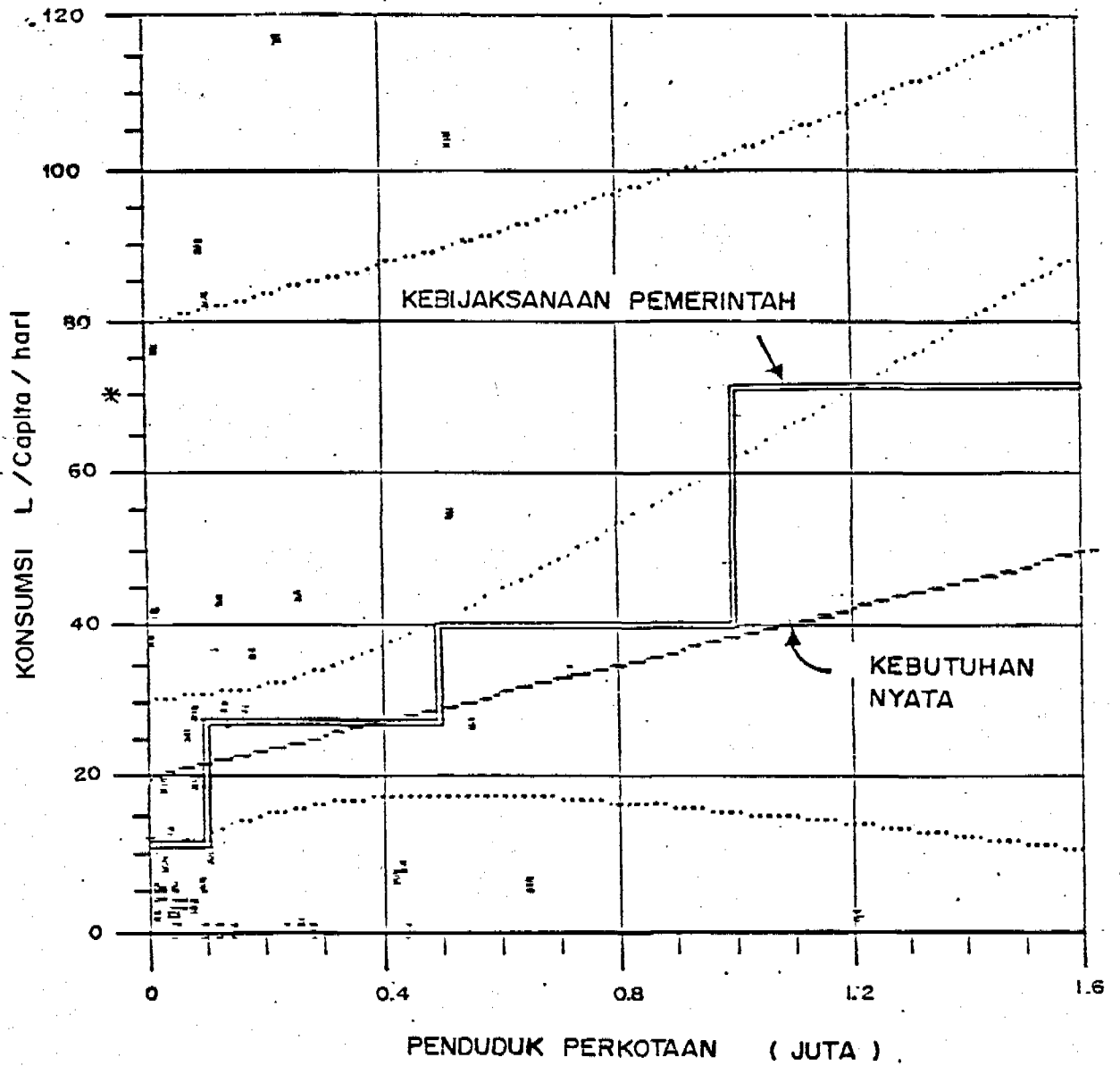
Harapan tersebut tidak dapat direalisasikan karena keterbatasan Pemerintah Daerah belum memberikan prioritas dalam memobilisasi dana pembangunan yang diperoleh dari pajak Bumi dan Bangunan dan pendapatan-pendapatan lainnya untuk menunjang Sektor Air Bersih, sehingga investasi yang telah ditanam dipandang tidak efisien.

Oleh karena itu salah satu kebijaksanaan yang perlu dilaksanakan dalam Repelita V hendaknya memberikan prioritas memperluas jaringan distribusi untuk memanfaatkan kelebihan kapasitas produksi yang telah ada/tersedia.

KEBUTUHAN DOMESTIK

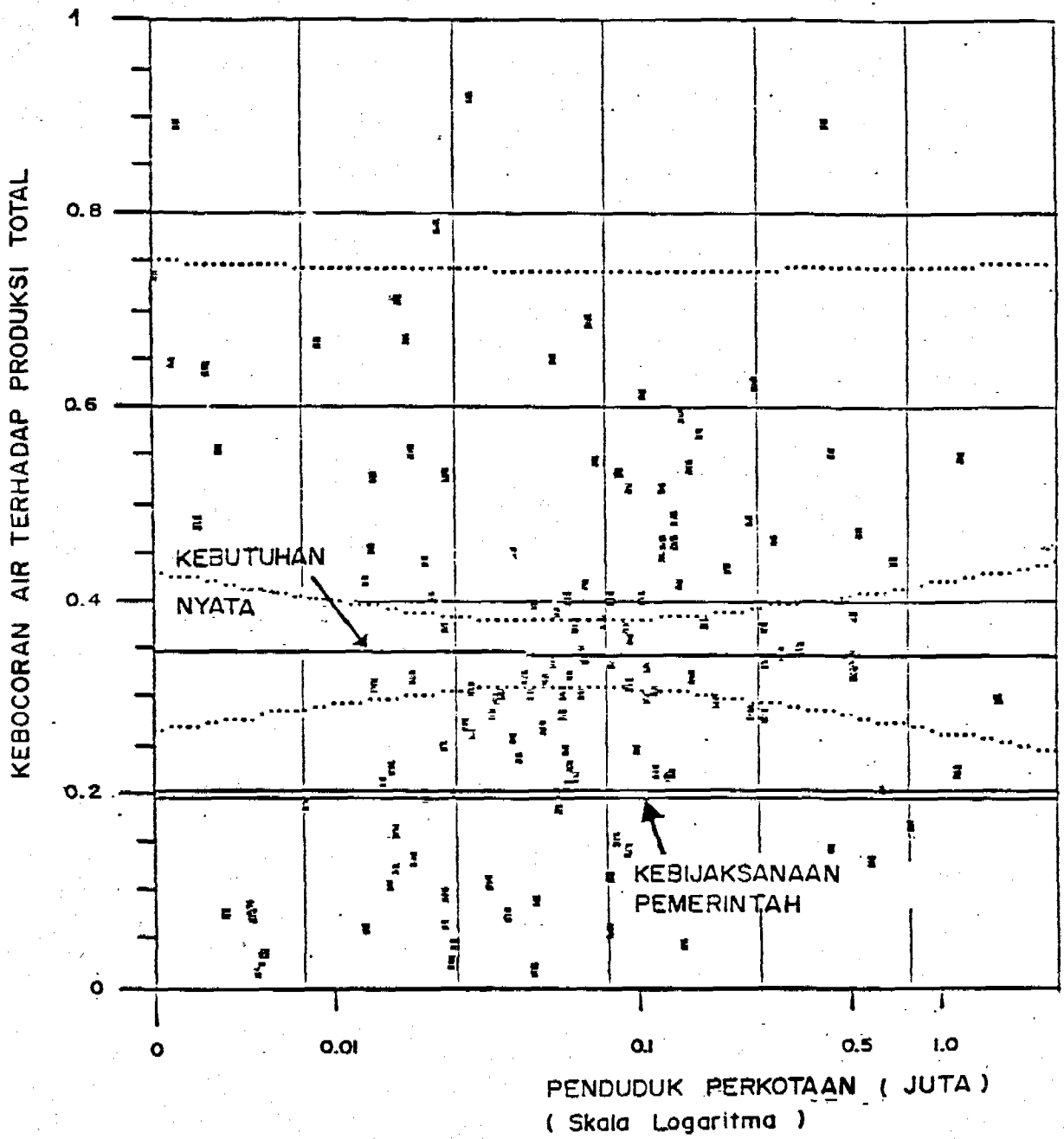


KEBUTUHAN NON DOMESTIK



* Based on no. of persons_served by_piped water supply

KEBOCORAN AIR



3.5. Realisasi Konsep Sistik BNA :

Pelaksanaan konsep sistim BNA (Basic Need Approach) adalah untuk merangsang Pemerintah Daerah agar ikut berpartisipasi dalam membangun Sistim Penyediaan Air Bersih dengan cara memberikan subsidi (Grant) sampai tingkat konsumsi rata-rata 60 l/c/hari kepada 60% penduduk daerah perkotaan.

Pendapatan atau keuntungan dari hasil penjualan Air Bersih dari pada sistim yang telah dibangun melalui konsep ini, diharapkan dapat dipergunakan untuk menyempurnakan atau memperluas sistim sampai pada tingkat konsumsi yang sebenarnya.

Setelah sistim dioperasikan, ternyata harapan yang terkandung dibalik konsep BNA tidak pula dapat terealisasi karena sebagian keuntungan perusahaan menjadi sumber pembiayaan pemerintah daerah untuk membangun sektor-sektor lainnya.

Akan hal ini hendaknya Pemerintah Daerah mulai lebih menyadari bahwa Air Bersih bukanlah sebagai sumber pendapatan daerah.

IV. KEBIJAKSANAAN PEMBANGUNAN SUBSECTOR AIR BERSIH PADA REPELITA V.

4.1. Kebijakan Umum.

Sesuai dengan Garis-garis Besar Haluan Negara tahun 1988, perumusan kebijaksanaan umum Pembangunan Subsector Air Bersih pada Repelita V meliputi :

- (1). Usaha-usaha untuk menunjang pembangunan sektor lain seperti sektor perumahan & pemukiman, industri dan pariwisata serta sektor kesehatan.
- (2). Usaha-usaha untuk meningkatkan efisiensi pemanfaatan dana pusat sebagai modal awal, untuk merangsang pembangunan sistim secara mandiri oleh pemerintah daerah yang meliputi dana untuk investasi, operasi dan pemeliharaan.

Usaha tersebut pada dasarnya merupakan bentuk bantuan pemerintah pusat dalam mengawali program P3KT.

- (3). Usaha-usaha untuk menyempurnakan institusi, untuk menunjang pengelolaan sistim yang lebih mantap dan yang didukung oleh peraturan

perundangan yang dapat memberikan peluang dalam perluasan serta pengembangan sistim secara mandiri.

4.2. Kebijakan Teknis.

Menyadari bahwa keterbatasan dana merupakan kendala untuk pencapaian target pembangunan, sistim prioritas perlu dikembangkan dengan tetap memperhatikan kriteria-kriteria teknis, sosial, ekonomi serta finansial.

Faktor-faktor yang dapat dipertimbangkan meliputi :

(1). Penduduk yang memerlukan sistim perpipaan :

Pembangunan Sistim Penyediaan Air Bersih selama Repelita V hanya ditujukan untuk "penduduk yang benar-benar memerlukan pelayanan melalui sistim perpipaan", sedemikian sehingga biaya investasi menjadi lebih efektif.

Penduduk yang dimaksud adalah yang mempunyai kesulitan dalam mengupayakan alternatif sumber air misalnya di daerah-daerah dengan kepadatan tinggi, daerah dengan air tanah yang dipengaruhi air asin, daerah dengan tingkat pencemaran air tanah yang tinggi dan lain-lain.

Pertimbangan tersebut diambil mengingat sebagian penduduk masih memungkinkan untuk mengupayakan alternatif lain di luar sistim perpipaan.

(2). Konsumsi Air Perkapita :

Konsumsi air perkapita akan didasarkan pada tingkat konsumsi nyata yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman yang ada di Indonesia.

Adapun tingkat konsumsi air perkapita yang diusulkan adalah sebagai berikut :

Katagori Penduduk Perkotaan	Sambungan Rumah l/c/d	Kran Umum l/c/d	Konsumsi Non- Domestic l/c/d	Kebocoran l/c/d	Total l/c/d
> 1000.000	190	30	60	50	260
500-1000.000	170	30	40	45	220
100- 500.000	150	30	30	40	190
20- 100.000	130	30	20	30	155
3- 20.000	100	30	10	25	120

Catatan :

Perbandingan Sambungan Rumah dan Kran Umum adalah 75 : 25.

(3). Pelayanan Melalui Kran Umum :

Pelayanan melalui kran umum tetap dikenakan biaya pemakaian, agar masyarakat benar-benar memakai air bersih sesuai dengan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan yang dipandang penting.

Lokasi serta persentase penduduk yang mendapat pelayanan melalui kran umum harus didasarkan kepada study komprehensif.

(4). Biaya Sambungan :

Biaya sambungan yang dibebankan kepada pelanggan air bersih, baik besarnya biaya maupun pelaksanaannya harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang tidak terlalu membebani pelanggan.

(5). Efektivitas Biaya

Efektivitas biaya pembangunan yang dinyatakan dalam jumlah penduduk yang dilayani per unit biaya investasi, merupakan kriteria untuk menentukan urutan prioritas.

(6). Kemampuan Mendapatkan Keuntungan :

Kemampuan untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan air, dapat ditentukan dengan membandingkan antara rencana pendapatan dan biaya operasi & pemeliharaan.

Rasio tersebut dapat membantu untuk menyiapkan program investasi yang optimum.

(7). Perbedaan Biaya Konstruksi :

Biaya konstruksi per unit komponen sistim penyediaan air bersih di beberapa daerah di Indonesia dapat bervariasi yang umumnya dipengaruhi oleh kemudahan untuk mendatangkan bahan ke lokasi.

Hal ini perlu dipertimbangkan dalam menentukan alokasi biaya pembangunan untuk setiap propinsi.

(8). Mekanisme Pembiayaan

Kebijaksanaan Pembiayaan beserta mekanismenya diarahkan untuk merangsang Pemerintah Daerah dalam pengambilan keputusan-keputusan detail yang sejalan dengan kebijaksanaan Nasional.

(9). Daerah Semi Perkotaan

Meskipun daerah ini tidak masuk dalam daftar NUDS (National Urban Development Strategy), operasi dan pemeliharaan sistim penyediaan air bersih secara penuh akan menjadi tanggung jawab perusahaan air bersih perkotaan.

Oleh karena itu perhatian untuk daerah Semi Perkotaan yang umumnya dilayani melalui sistim "IKK/SAK" (Sistim Ibukota Kecamatan/Sistim Aliran Konstan) atau yang sejenis, perlu tetap diberikan.

(10). Kriteria Perencanaan

Setiap langkah pembangunan Subsector Air Bersih akan melibatkan masalah biaya dan manfaat, yang dipengaruhi oleh besarnya nilai yang diberikan untuk setiap elemen sistim.

Besarnya nilai yang diberikan untuk merencanakan suatu sistim didefinisikan sebagai "Kriteria Perencanaan"

Elemen Kriteria Perencanaan yang mempengaruhi besarnya kapasitas suatu sistim penyediaan Air Bersih adalah :

(a). Persentase penduduk yang dilayani melalui kran umum maupun sambungan rumah.

- (b). Tingkat konsumsi Air perkapita untuk kebutuhan Rumah Tangga (Domestic).
- (c). Tambahan konsumsi Air untuk keperluan Non-Domestic.
- (d). Tambahan konsumsi air untuk keperluan kebocoran (Tingkat Kebocoran Air).

Agar biaya investasi yang ditanam dapat lebih efisien maka perencanaan sistim harus didasarkan pada kriteria perencanaan yang mendekati kebutuhan nyata.

Gambar 3-1 dan 3-2 dan 3-3 di bab III, menerangkan tentang perlunya kriteria perencanaan ditinjau kembali untuk dipergunakan pada Repelita V.

(11). Kriteria Disain

Kriteria disain merupakan alat untuk membuat rincian detail dari pada komponen-komponen suatu sistim.

Kriteria yang telah digunakan terdahulu misalnya kebutuhan harian maksimum = 1,15 kali kebutuhan rata-rata ; kapasitas Reservoir sebesar kurang lebih 20% dari kebutuhan harian maksimum jam puncak yang bervariasi antara 1,25-2 kali kebutuhan maksimum dan lain lain, pada tahap study ini diusulkan tidak berubah.

4.3. Kebijakan Operasional

Untuk melaksanakan kebijakan yang telah dirumuskan diatas pada prinsipnya perlu didukung langkah-langkah berikut ini :

(1). Desentralisasi

Sesuai dengan makna PP.No.14 tahun 1987 tentang pengalihan sebagian tugas di bidang pekerjaan umum kepada Pemerintah Daerah, maka tindak lanjut aktivitas yang perlu dilaksanakan adalah :

- a. Penentuan lingkup kegiatan yang akan dialih tugaskan dan tata cara alih tanggung jawab dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah disesuaikan dengan kesiapan pemerintah daerah untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar tersebut.

b. Penelaahan tentang potensi dan kendala yang ada, baik di daerah maupun pusat mengenai :

- institusi/organisasi
- kemampuan staf/tenaga kerja
- kemampuan daerah untuk memobilisasi dana

Aktivitas tersebut merupakan langkah awal yang penting karena akan sangat menentukan keberhasilan usaha alih-tugas wewenang dan tanggung jawab ke Pemerintah Daerah.

(2). Deregulasi

Tindak lanjut aktivitas yang erat hubungan dengan masalah deregulasi adalah :

- a. Penelaahan tentang peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai pengelolaan perusahaan daerah air bersih yang meliputi wewenang perusahaan untuk memperluas sistim, penetapan tarif dan lain-lain.
- b. Penelaahan tentang peraturan dan perundangan yang berlaku mengenai pemanfaatan sumber - sumber air untuk keperluan air baku air bersih yang meliputi tata cara pemilihan sumber air, kuantitas yang dapat diambil dan pemilihan kualitas sumber yang akan dimanfaatkan.

(3). Debirokratisasi :

Lingkup aktivitas diutamakan untuk menelaah potensi dan kendala pengembangan institusi yang meliputi :

- (a). uraian tugas
- (b). tata laksana pengadaan tenaga kerja
- (c). sistim kepegangatan
- (d). pengembangan sumber daya manusia
- (e). pedoman atau petunjuk-petunjuk pelaksanaan yang berkaitan dengan pengembangan institusi

(4). Swastanisasi

Lingkup kegiatan atau aktivitas yang perlu segera di laksanakan adalah :

- (a). Penelaahan dan penentuan lingkup proyek yang dapat dibangun dan dikelola dengan dana swasta.

- (b). Peraturan dan perundangan yang dapat mendukung pelaksanaan swastanisasi pembangunan dan pengelolaan dengan dana swasta.
- (c). Institusi terkait dengan usaha swasta di bidang air bersih.

V. STRATEGI PEMBANGUNAN SUBSECTOR AIR BERSIH PADA REPELITA V

5.1. Umum :

Strategi pembangunan Subsector Air bersih pada Repelita V difokuskan kepada 3 (tiga) kegiatan utama yaitu :

- (1). Peningkatan Program Operasi dan Pemeliharaan
- (2). Penyelesaian Proyek-Proyek Pelita IV
- (3). Penanganan Proyek-Proyek Baru pada Repelita V

Ketiga pokok kegiatan tersebut pelaksanaannya di sesuaikan dengan dana yang tersedia dan potensi serta kendala Institusi yang ada, baik di tingkat pusat maupun daerah.

5.2. Strategi Fisik.

Pendekatan-pendekatan yang telah dilakukan dalam Study Penunjang Rancangan Induk kebijaksanaan Subsector Air Bersih adalah :

- (a). Pengembangan serangkaian model aktivitas
- (b). Penetapan urutan prioritas pelaksanaan aktivitas
- (c). Perkiraan biaya pelaksanaan untuk seluruh aktivitas

Urutan prioritas pelaksanaan aktivitas yang dihasilkan dari study ini dan yang diharapkan dapat menjadi pedoman dalam penyelesaian luncuran proyek-proyek Pelita IV dan penanganan proyek-proyek baru pada Repelita V adalah :

- Prioritas 1 = Operasi dan pemeliharaan
- Prioritas 2 = Pemanfaatan kelebihan kapasitas produksi dari sistim yang ada
- Prioritas 3 = Rehabilitasi sistim yang ada
- Prioritas 4 = Pembangunan sistim baru
- Prioritas 5 = Perluasan sistim yang ada

Seperti telah disinggung dimuka, urutan prioritas di tetapkan berdasarkan biaya terendah dan manfaat

terbesar yang dinyatakan dalam unit cost/capita dan tambahan penduduk yang dapat dilayani.

Sementara itu, komponen aktivitas/kegiatan telah dipertimbangkan berdasarkan :

- (a). kelengkapan komponen suatu sistim serta usia pakainya (life time)
- (b). Jumlah penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun yang mempengaruhi kebutuhan (Demand) dan pengadaan air (Supply).

5.2.1. Peningkatan Program Operasi & Pemeliharaan :

Agar supaya sistim dapat dioperasikan secara normal dan berkesinambungan maka perhatian pada masalah operasi & pemeliharaan perlu ditingkatkan.

Peningkatan perhatian, tidak hanya untuk sistim yang telah beroperasi penuh sesuai perencanaan tetapi diberikan pula kepada sistim yang akan di sempurnakan komponennya serta sistim-sistim baru.

Hal itu berarti bahwa ke dalam biaya operasi & pemeliharaan harus diperhitungkan cadangan biaya penyusutan komponen-komponen sistim yang telah aus, sedemikian sehingga usia pakai dari pada sistim dapat sesuai dengan perencanaan, bahkan dapat diperpanjang.

5.2.2. Pemanfaatan Kelebihan Kapasitas Produksi :

Dimulai dari Repelita III sampai akhir Pelita IV, banyak unit-unit produksi telah dibangun di beberapa kota, tetapi tidak disertai dengan unit distribusi yang sesuai dengan kapasitas produksi terpasang.

Dengan demikian, agar kapasitas produksi terpasang tersebut dapat dioperasikan secara optimum, maka perluasan jaringan distribusi yang meliputi pemasangan pipa-pipa baru atau penambahan jumlah sambungan rumah sampai dengan target yang diharapkan, perlu segera dilaksanakan.

5.2.3. Rehabilitasi Sistim Yang Ada :

Program rehabilitasi terutama ditujukan untuk menurunkan tingkat kebocoran dari sistim distribusi yang ada.

Kota-kota yang diusulkan menjadi bagian program Rehabilitasi adalah kota-kota yang mempunyai tingkat kebocoran diatas 40% dari pada kapasitas produksi yang ada, dan mempunyai profit bila program ini dilaksanakan.

5.2.4. Pembangunan Sistim Baru :

Pembangunan sistim baru pada dasarnya di tujukan untuk kota-kota yang sama sekali belum mempunyai sistim Penyediaan Air Bersih, tetapi telah memiliki study kelayakan dan rancangan detail yang telah mulai dirintis pada tahun-tahun terakhir Pelita IV.

5.2.5. Perluasan Sistim Yang Ada.

Perluasan sistim yang ada ditujukan untuk meningkatkan jumlah pelayanan sampai dengan tingkat kebutuhan yang sebenarnya.

Hal ini dilakukan agar keseimbangan antara kebutuhan dan pengadaan (Demand & Supply) tetap terjaga sehingga sistim dapat dioperasikan secara normal yang berarti pula menjaga sistim untuk dioperasikan sampai usia pakai sesuai perencanaan.

5.3. Strategi Bidang Institusi.

5.3.1. Ukuran Institusi/Kelembagaan terkecil :

Lembaga yang menangani Subsector Air Bersih di Indonesia dipandang cukup maju yaitu yang telah dikelola pada tingkat Kotamadya maupun Kabupaten.

Tanggung jawab Perusahaan Air Bersih pada tingkat II tersebut meliputi pengelolaan (manajemen) pengoperasian dan pemeliharaan, dimana untuk sistim perkotaan umumnya dikelola kotamadya sedangkan untuk Sistim Semi perkotaan dikelola Kabupaten.

Perusahaan ditingkat Kotamadya/Kabupaten (Tingkat II) dipertimbangkan sebagai standard ukuran terkecil daripada suatu perusahaan Air Bersih karena:

- (a). Tersedianya Staff yang trampil
- (b). Dukungan keuangan yang lebih besar
- (c). Adanya pemusatan Fasilitas Laboratorium, Workshop dan lain-lain yang relatip dekat dengan daerah semi perkotaan

Satu-satunya kelemahan dari sistim tingkat II tersebut adalah terbatasnya jenjang kepangkatan tenaga-tenaga ahli sehingga berpengaruh terhadap pengadaan tenaga ahli yang diperlukan perusahaan agar pengelolaannya sesuai harapan.

Gagasan tentang Perusahaan Air Bersih tingkat I (Propinsi) dapat membantu memberi jalan keluar tentang masalah jenjang kepangkatan, tetapi tampaknya gagasan tersebut bertentangan dengan kebijaksanaan P3KT.

Walaupun demikian, gagasan tersebut mungkin diperlukan untuk daerah di luar Jawa.

Kecenderungan tersebut dimungkinkan karena jumlah pusat-pusat kota yang relatif lebih sedikit, memerlukan penggabungan pengelolaan sistim di dua kabupaten atau lebih dalam satu perusahaan.

5.3.2. Penyelenggaraan Perusahaan (Performance).

2 (dua) saran yang dapat dipertimbangkan sehubungan dengan penyelenggaraan perusahaan adalah :

- (a) Masa jabatan Direktur Perusahaan air Bersih minimum 4 (empat) tahun, sedemikian sehingga tersedia cukup waktu untuk konsolidasi, evaluasi dan pengembangan gagasan untuk tujuan perbaikan perusahaan jangka panjang.
- (b) Lembaga PMDU (Provincial Monitoring and Development Unit) yang baru-baru ini dibentuk agar tetap dipertahankan dan diperkuat.

Lembaga tersebut diharapkan dapat memberikan bimbingan dan dukungan kepada perusahaan-perusahaan Daerah Air Bersih yang lemah.

5.4. Strategi Bidang Finansial :

5.4.1. Peningkatan Manajemen :

Manajemen yang baik untuk sistim kota-kota besar maupun sedang, tampaknya dapat memberi peluang lebih baik dalam pengembalian investasi yang telah ditanam untuk sistim penyediaan Air Bersih.

Manajemen yang baik tersebut terutama mencakup :

- (a) Perhatian yang lebih besar terhadap masalah pemasangan dan pemeliharaan meter air sebagai alat untuk memeriksa dan memonitor pemakaian air.

- (b) Keaktifan dalam memeriksa dan mengurangi kebocoran karena adanya sambungan-sambungan liar, kebocoran pipa dan lain-lain.
- (c) Keaktifan hubungan masyarakat.
- (d) Tindakan cepat dalam mengatasi tunggakan langganan.
- (e) Perhatian lebih besar terhadap masalah tingkat keahlian dan efektivitas organisasi.
- (f) Pengembangan program yang komprehensif untuk tindakan-tindakan pencegahan.
- (g) Tarif Air yang wajar.

Sehubungan dengan masalah tarif, maka tarif dasar ("A") yang berlaku saat ini berkisar antara Rp.50,- sampai Rp. 400,-setiap m³.

Kecuali untuk sistim mata air dengan pengaliran gravitasi, maka tarif air bersih di bawah Rp. 100,-/m³, dipandang tidak dapat menutupi biaya-biaya operasi dan pemeliharaan yang wajar.

Pengamatan awal terhadap pendapatan (income) daripada 160 perusahaan Daerah air bersih, menunjukkan bahwa 70% dari perusahaan-perusahaan tersebut tidak dapat secara penuh menutupi biaya-biaya operasi, pemeliharaan dan dipresiasi (penyusutan).

Dengan mengabaikan kemungkinan pengurangan biaya operasi & pemeliharaan yang mungkin dapat dicapai melalui peningkatan manajemen, maka dengan menaikkan tarif dasar ("A") sebesar rata-rata 2 (dua) kali lebih besar dari tarif yang berlaku saat ini (faktor bervariasi antara 1,7 s/d 5 kali), diperkirakan sebanyak 95% dari perusahaan dapat mencapai "Break Even".

Dengan kenaikan tarif tersebut melalui tagihan bulanan antara Rp.3000,- Rp.12.000,- per rumah tangga, maka tarif dasar bervariasi antara Rp. 100,-

Rp.400,-/m³, sedangkan tarif dasar yang telah disarankan untuk dilaksanakan bervariasi antara Rp.125,- - Rp 500,-/m³.

5.4.2. Subsidi :

Untuk daerah-daerah Semi Perkotaan yang mempunyai Sistim dengan pengolahan lengkap (Full

Treatment) dan dialirkan dengan pemompaan, pada umumnya mendapat kesulitan dalam mencapai "Break Even".

Keadaan demikian memerlukan dukungan dana berupa Subsidi silang dari Sistim perkotaan.

5.4.3. Partisipasi Daerah :

Partisipasi daerah dalam pembangunan Sistim penyediaan air bersih, pada dasarnya diperlukan untuk mendukung terbangunnya sistim.

Walaupun demikian partisipasi daerah dalam menyediakan tenaga-tenaga trampil, untuk membangun sistim perkotaan cenderung memperbesar masalah koordinasi pelaksanaan kontrak-kontrak pekerjaan.

Kemungkinan partisipasi daerah dalam pembangunan Sistim Semi perkotaan misalnya dalam pemasangan pipa, masih dalam penelitian.

Disarankan bahwa partisipasi daerah dapat di tingkatkan pada tahap perencanaan misalnya penentuan jalur pipa, lokasi kran umum dan lain-lain.

Progam P3KT tampaknya dapat memberikan peluang lebih besar untuk itu.

5.5. Penyertaan Modal Swasta.

Walaupun masih dalam tahap penelitian, terdapat beberapa kemungkinan dimana modal swasta dapat membantu pembangunan Subsector yaitu dalam menyediakan :

(a) Sistim yang lengkap

(b) Bagian-bagian komponen dari pada sistim misalnya Instalasi pengolahan air.

Kecuali pelayanan langsung ke langganan domestic yang masuk katagori "Sektor Sosial", swasta dimungkinkan untuk berperan.

Untuk meningkatkan daya tarik sektor Swasta maka investasi yang ditanam harus mampu menghasilkan keuntungan yang memadai.

Hal ini berarti bahwa harga air sistim dimana Swasta berperan akan menjadi lebih tinggi di bandingkan bila dibiayai oleh perusahaan daerah.

Kemungkinan tersebut menjadi terbuka bila sistim yang dibangun dengan menyertakan modal Swasta diarahkan ke Daerah-daerah industri atau ke kompleks perumahan mewah (Real estate).

Walaupun demikian keuntungan penyertaan sektor Swasta adalah sebagai berikut :

- (1) Dapat menarik dana luar negeri bila perusahaan asing ikut berperan.
- (2) Dapat memperpendek waktu perencanaan maupun pelaksanaan.
- (3) Dapat menjamin kelangsungan pembangunan, tanpa dipengaruhi kendala atas keterbatasan instansi peminjam dana.

Faktor lain yang dapat meningkatkan daya tarik sector Swasta adalah kerangka peraturan dan perundangan yang ditetapkan Pemerintah yang telah mulai dirintis yang mencakup lingkup proyek dan daerah pelayanan.

Sebelum gagasan ini direalisasikan maka diperluakan uji coba pada lokasi tertentu untuk menilai biaya, manfaat, dukungan yang diperlukan Swasta, kelemahan-kelemahannya dan lain-lain.

VI. INDIKASI PROGRAM & SASARAN

6.1. Umum :

Sejalan dengan Strategi pembangunan Subsector Air Bersih maka selain memberikan perhatian yang lebih besar pada masalah operasi & pemeliharaan (O & M), program dan sasaran dititik beratkan kepada :

- (a) Penyelesaian Proyek-proyek Pelita IV untuk kota-kota dengan sistim BNA maupun IKK, baik yang terdaftar dalam NUDS (National Urban Development Strategy) maupun Non-NUDS.
- (b) Pembangunan Sistim Baru, terutama untuk kota-kota yang masuk dalam daftar NUDS.

6.2. Sasaran/Target.

6.2.1. Target Maksimum :

Seperti telah dijelaskan pada bab. pendahuluan, hasil study diharapkan dapat memberikan masukan tentang

perkiraan target yang dapat dicapai Subsector Air Bersih pada Repelita V.

Didasarkan atas kebutuhan penduduk serta keterbatasan institusi yang ada, maka target maksimum yang dapat dicapai sektor Air Bersih pada Repelita V adalah :

Tabel : 6.1. Indikasi Program Repelita V

NO.	Program Pelita V	Tambahan Pend.yg dilayani	Tambahan jumlah SR.	Tambahan jumlah KU.
1.	Pemanfaatan Kelebihan Kapasitas Produksi (158 Kota)	1.777.959	203.194	3.553
2.	Rehabilitas Sistim yang ada (74 Kota)	1.046.679	119.619	2.091
3.	Pembangunan Sistim BNA Baru (66 Kota)	1.197.297	136.829	2.397
4.	Perluasan Sistim yang telah ada (198 Kota)	9.061.618	1.035.617	18.123
Total		13.083.553	1.495.259	26.164

6.2.2. Penyelesaian proyek-proyek Pelita IV :

Yaitu proyek-proyek yang telah dimulai pada Pelita IV dan diharapkan dapat diselesaikan pada Pelita V mendatang, dimana sumber dana luar negeri (Loan) untuk proyek ini adalah seperti diperinci dalam daftar lampiran.

(1). Kota-kota dengan sistim BNA.

Penyelesaian Pembangunan 114 kota dalam daftar NUDS dan 28 Kota dalam daftar Non-NUDS.

(2). Kota-kota dengan sistim IKK/SAK.

Penyelesaian Pembangunan 103 kota dalam daftar NUDS dan 453 Kota dalam daftar Non-NUDS.

6.2.3. Pembangunan Sistim Baru :

Pembangunan sistim penyediaan Air Bersih untuk kota-kota baru di bagi kedalam 2 kelompok sebagai berikut :

(a). Kelompok yang pendanaannya diperkirakan segera disetujui (pipeline).

- Jumlah kota yang direncanakan ditangani dalam katagori ini adalah 133 Kota.

(b). Kelompok yang pendanaannya masih dalam proses pengusulan (INDICATIVE).

Jumlah kota yang masuk katagori ini kurang lebih 170 kota.

6.3. Tolok Ukur Pencapaian Target.

Beberapa alternatif tolok ukur untuk menilai pencapaian Sasaran/Target Repelita V adalah sebagai berikut :

- (1). Kapasitas Produksi
- (2). Tingkat Kebocoran Air
- (3). Jumlah Kota
- (4). Jumlah Sambungan

Tolok ukur "kapasitas produksi" harus didasarkan kepada hasil pengukuran debit yang di produksi oleh instalasi. Data yang ada menunjukkan bahwa pengukuran yang dilakukan saat ini dipandang tidak cukup teliti.

Pengamatan terhadap "tingkat kebocoran" tergantung kepada peralatan yang dipasang di setiap langganan sehingga tolok ukur ini dipandang tidak praktis.

Tolok ukur "jumlah kota" cenderung menimbulkan banyak pendapat yang diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

- (a). Jumlah Kota di Indonesia yang terbatas.
- (b). Kebutuhan perkotaan yang terus meningkat sehingga satu atau lebih kota-kota yang sama dapat selalu di tangani dalam setiap Pelita.

Perbedaan pendapat & kesulitan memantau target telah terjadi pula pada tolok ukur "% penduduk yang di layani".

Karena penduduk yang terus meningkat, maka % target pelayanan sulit didekati bahkan ada kesan mengalami penurunan.

Oleh karena itu tolok ukur yang disarankan untuk memonitor tingkat pencapaian target adalah dengan mengamati tambahan "jumlah sambungan" yang berhubungan erat dengan tambahan jumlah penduduk yang di layani serta penduduk yang selalu meningkat dari tahun ke tahun.

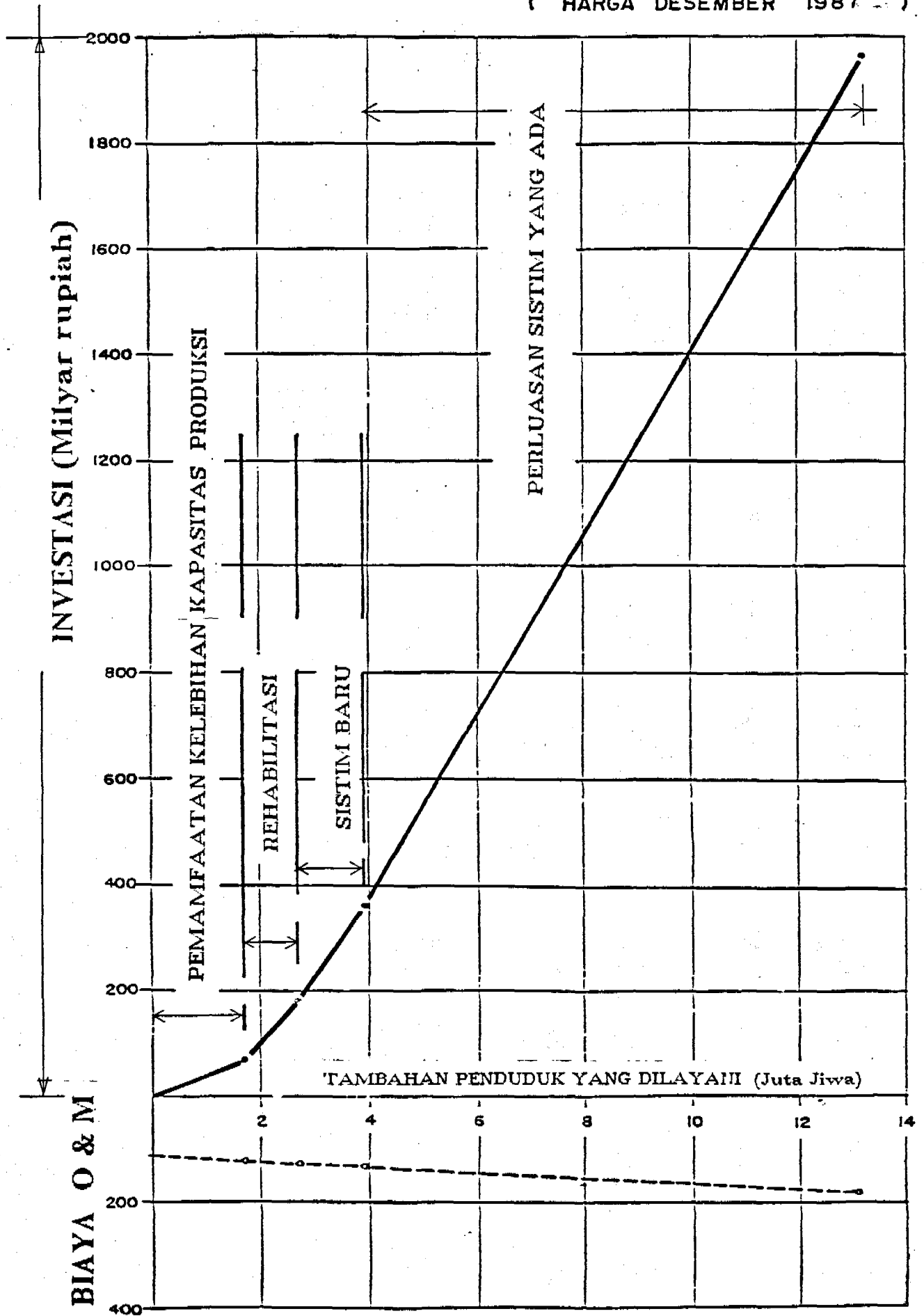
6.4. Rencana Pembiayaan :

Biaya investasi termasuk O & M yang diperlukan untuk mencapai target seperti yang diuraikan pada bab 6.2.1, disajikan pada gambar 6-1 dan tabel 6.2.

Sementara itu, berdasarkan data status proyek-proyek luncuran Pelita IV, usulan proyek yang pendanaannya sudah ada indikasi disetujui serta proyek-proyek yang pendanaannya dalam proses pengusulan, maka besarnya biaya investasi yang diperkirakan dapat diserap Subsector Air Bersih selama Repelita V, disajikan dalam tabel 6-3.

INVESTASI DAN BIAYA O & M PADA REPELITA - V

(HARGA DESEMBER 1987 ...)



Tabel : 6.2. Target Maksimum Program Repelita V
(Daerah perkotaan).

No. Keterangan	Repelita IV	Repelita V
1. Penduduk Perkotaan pada akhir Repelita (juta jiwa)	49,5	58,5
2. Penduduk Dilayani pada akhir Repelita (juta jiwa)		
(a). Melalui Sistim Perpipaan	13,2	26,4
(b). Alternatif lain	15,0	17,0
Total	28,2	43,7
3. Jumlah sambungan pada akhir Repelita (ribuan)		
(a). Melalui Sambungan Rumah (SR)	1.600	3.095
(b). Melalui sambungan Kran Umum (KU)	20	46
4. Investasi (Milyard Rp.)		
(a). Study, disain konstruksi		
a1. Pemanfaatan Kelebihan Kap. produksi		99,89
a2. Rehabilitasi		175,57
a3. Pembangunan Sistim BNA baru		266,98
a4. Perluasan Sistim yang ada		2422,56
(b). O & M		2.965 1.002
Total		3.967

Tabel : 6.3. Rencana biaya Investasi Subsector Air Bersih pada Repelita V dengan Dana Luar Negeri (Perkotaan + Semi Perkotaan)

Milyard Rp.

SUMBER DANA	INVESTASI FISIK			O & M	Total Investasi
	Carry Over	Pipe Line	Indicative		
A. DANA PINJAMAN LUAR NEGERI :					
1. IBRD	26,05	222,06	103,02	-	
2. ADB	177,76	100,42	-	-	
3. JEPANG	174,95	18,03	162,91	-	
4. BELANDA	3,73	90,26	-	-	
5. BILATERAL LAIN	116,27	30,66	97,28	-	
6. PERAN SWASTA	-	-	184,98	-	
	498,76	461,43	548,19	-	1.508,16
DANA					
B. G.O.I (PENDAMPING)	332,51	307,62	365,46	850,17	1.855,76
	813,27	769,05	913,65	850,17	3.363,92

Catatan :

- (1). Perbandingan Loan dan G.O.I diassumsikan 60 : 40
- (2). perkiraan Biaya O & M sudah termasuk existing + Rencana.
- (3). Carry over, mencakup proyek-proyek luncuran Pelita IV dimana dana pinjaman (Loan) berserta dana rupiahnya telah tersedia.
- (4). Pipeline, mencakup proyek-proyek yang pendanaannya diperkirakan segera disetujui
- (5). Indicative, mencakup proyek-proyek yang pendanaannya dalam proses pengusulan.

LAMPIRAN I

FUNDING SOURCES OF ANTICIPATED CARRY-OVER INTO REPELITA.V

Rp. BILLION

FUNDING SOURCES	STATUS OF FUNDS				
	CARRY OVER	PIPE LINE	INDICATIVE	TOTAL FUNDS	% TOTAL
A. LOAN :					
1. IBRD	26.05	222.06	103.02	351.13	23.28
2. ADB	177.76	100.42		278.18	18.44
3. OEFC	174.95	18.03	162.91	355.89	23.59
4. NETHERLANDS	3.73	90.26		93.99	6.23
5. OTHER BILATERAL	116.27	30.66	97.28	244.21	16.19
6. PRIVATE SECTOR			184.98	184.98	12.26
	498.76	461.43	548.19	1508.38	100.00
B. GOI :					
	332.51	307.62	365.46	1005.59	
	831.27	769.05	913.65	2513.97	

Notes :

- 1). Carry over cover loans already signed together with associated GOI contributions.
Pipeline cover loans verbally agreed but have not been signed.
Indicative cover the proposed new project which have an indications to proved.
- 2). It has been assumed that foreign/local currency ratio are 60 : 40 to drive GOI commitments.
- 3). Figures refer to the best information available at 10 th june, 1988

DAFTAR
PROGRAM REPELITA V
SUB SECTOR AIR BERSIH
DENGAN DANA BANTUAN LUAR NEGRI

LAMPIRAN I/2

STATUS & SUMBER DANA	NILAI DANA LUAR NEGRI PERSENTASE (MILIAR Rp.)	
A. LUNCURAN (CARRY OVER) PELITA IV :		
1. IBRD	26.05	5.23
2. ADB	177.76	35.67
3. JEPANG	174.95	35.10
4. BELANDA	3.37	0.68
5. BILATERAL LAINNYA	116.27	23.33
SUB TOTAL :	498.40	100.00
B. DANA DALAM PROSES (PIPE LINE) :		
1. IBRD	222.06	48.12
2. ADB	100.42	21.76
3. JEPANG	18.03	3.91
4. BELANDA	90.26	19.56
5. BILATERAL LAINNYA	30.66	6.64
SUB TOTAL :	461.43	100.00
C. INDIKASI DANA :		
1. IBRD	103.02	18.79
2. ADB	0.00	0.00
3. JEPANG	162.91	29.72
4. BELANDA	0.00	0.00
5. BILATERAL LAINNYA	97.28	17.75
6. PERAN SWASTA	184.98	33.74
SUB TOTAL :	548.19	100.00
GRAND TOTAL :	1,508.02	

CATATAN :

Nilai tukar mata uang asing (Bank Indonesia per 31 Maret 1988)

a). Yen (YPY)	1 Rp.	13.22
b). Perancis (FRF)	1 Rp.	292.95
c). Swis (CHF)	1 Rp.	1,206.10
d). Denmark (DKK)	1 Rp.	258.55
e). US.Dollar (USD)	1 Rp.	1,659.00
f). Mark Jerman (DEM)	1 Rp.	995.58
g). Belanda (NLG)	1 Rp.	886.80

SUMMARY REPELITA V. PROGRAM
WATER SUPPLY FUNDING SOURCES

LAMPIRAN I/3

AGENCY	TOTAL VALUE OF LOAN		PERCENT
	MILLION USD	BILLION Rp.	
A). CARRY OVER TO REPELITA V. :			
1. IBRD	15.70	26.05	5.23
2. ADB	107.15	177.76	35.67
3. JAPAN	105.46	174.95	35.10
4. NETHERLAND	2.25	3.37	0.68
5. FRANC	46.65	77.39	15.53
6. DENMARK	10.27	17.03	3.42
7. GERMAN	13.17	21.85	4.38
Sub Total :	300.65	498.40	100.00
B). PIPE LINE STATUS :			
1. IBRD	133.85	222.06	53.32
2. ADB	60.53	100.42	24.11
3. JAPAN	10.87	18.03	4.33
4. NETHERLAND	54.41	90.26	10.88
5. GERMAN	5.68	9.42	2.26
6. AUSTRALIA	12.80	21.24	5.10
Sub Total :	278.14	461.43	100.00
C). INDICATIVE STATUS :			
1. IBRD	62.10	103.02	21.99
2. ADB	0.00	0.00	0.00
3. JAPAN	98.20	162.91	34.77
4. NETHERLAND	0.00	0.00	0.00
5. CIDA	10.64	17.65	3.77
6. PRIVATE SECTOR	111.50	184.98	39.48
Sub Total :	282.44	468.56	100.00
GRAND TOTAL :	861.23	1,428.39	

REMARK :

Exchange rate (Bank Indonesia per March 31, 1988)

a). Japanese Yen (YPY)	1 : Rp.	13.22
b). French Franc (FRF)	1 : Rp.	292.95
c). Swiss Franc (CHF)	1 : Rp.	1,206.10
d). Denish Kronner (USD)	1 : Rp.	258.55
e). US Dollar (USD)	1 : Rp.	1,659.00
f). Deutch Mark (DEM)	1 : Rp.	995.58
g). Netherland Guilders (NGL)	1 : Rp.	886.80

a). Existing funding arrangement data (CARRY OVER TO REPELITA V)

AGENCY		TOTAL LOAN (Million)	DISBURST. Up.to FY.87/88	DISBURST. PLAN FOR FY.88/89	CARRY OVER to Pelita V
IBRD					
1. LOAN 2275-IND	UDS	30.60	27.50	1.70	1.40
2. LOAN 2632-IND	UDS	43.30	15.40	13.60	14.30
3. LOAN 2236-IND	UDS	2.10	1.00	1.10	0.00
SUB TOTAL	:	UDS	76.00	43.90	16.40
ADB					
1. LOAN 493-INO	UDS	27.00	18.60	7.85	0.55
2. LOAN 547-INO	UDS	35.50	13.05	9.50	12.95
3. LOAN 550-INO	UDS	9.90	6.65	3.25	0.00
4. LOAN 629-INO	UDS	1.25	0.38	0.78	0.09
5. LOAN 731-INO	UDS	40.20	4.70	5.54	29.96
6. LOAN 768-INO	UDS	84.40		20.80	
SUB TOTAL	:	UDS	198.25	43.38	47.72
JAPAN (OECS)					
1. IP.245	YPY	5,730.00	4,673.00		
2. IP.290	YPY	4,500.00	200.00		
3. IP.306	YPY	10,923.00	101.00	3,307.00	12,872.00
4. IP.317	YPY	701.00	258.00	77.18	365.82
SUB TOTAL	:	YPY	21,854.00	5,232.00	3,384.18
NETHERLAND					
1. J-37C	NLG	6.60	1.22	1.77	4.21
SUB TOTAL	:	NLG	6.60	1.22	4.21
FRANCE					
1. 100 IKK	FRF	200.00	92.82	79.20	27.98
2. CISADANE	FRF	239.00		2.80	236.20
SUB TOTAL	:	FRF	439.00	92.82	82.00
DENMARK					
1. 51 IKK	DKK	72.00	6.14		65.86
SUB TOTAL	:	DKK	72.00	6.14	65.86

a). Existing funding arrangement data (CARRY OVER TO REPELITA V)

AGENCY		TOTAL LOADISBURST. (Million)Up to FY.87/88	DISBURST. PLAN FOR FY.88/89	CARRY OVER to Pelita V
GERMAN				
1. AL.83.65.207.	DEM	14.00	7.22	5.35
2. AL.77.65.375.	DEM	5.80	5.38	0.33
3. AL.77.65.381.	DEM	8.50	7.72	0.60
4. AL.77.65.456.	DEM	7.80	6.78	0.39
5. AL.81.65.821.	DEM	24.00	8.13	9.89
6. AL.85.65.137.	DEM	10.86	1.23	5.38
Sub Total :	DEM	70.96	36.46	21.94

b). Funds on PIPE LINE status :

	TOTAL VALUE OF LOAN		REMARK
	MILLION USD	BILLION Rp.	
IBRD :			
1. Nort & South Sulawesi	11.45	19.00	60% OF ANTICIPATED LOAN
2. J.U.D.P.II	122.40	203.06	60% OF ANTICIPATED LOAN
Sub Total :	133.85	222.06	
ADB :			
1.125 IKK	28.93	47.99	
2. Bandar Lampung	21.60	35.83	60% OF ANTICIPATED LOAN
3. M.U.D.P.II	10.00	16.59	20% OF ANTICIPATED LOAN
Sub Total :	60.53	100.41	
OECF :			
1. Ujung Pandang WSP	10.87	18.03	
Sub Total :	10.87	18.03	
NETHERLAND :			
1. BAWS II	27.30	45.29	
2. Sukabumi WSP.	4.86	8.07	
3. IKK West Java	1.60	2.66	
4. IKK Aceh	3.48	5.77	
5. West Java Ground Water	2.51	4.17	
6. HRDP. IV	0.64	1.06	
7. 17 Small Town West Java	5.88	9.76	
8. HRDP RTC, PMDU BDG	3.53	5.85	
9. GTA/Small Town West Java	3.80	6.30	
10. HRDP RTC/PMDU BDG.	0.80	1.33	
Sub Total :	54.40	90.26	

AGENCY / PROJECT	TOTAL VALUE OF LOAN		REMARK
	MILLION USD	BILLION Rp.	
GERMAN :			
1. Bengkulu WSP	5.68	9.42	
Sub Total :	5.68	9.42	
AUSTRALIA :			
1. NTB - NTT IKK WSP	12.80	21.24	
Sub Total :	12.80	21.24	

C). Funds on INDICATIVE Status :

AGENCY / PROJECT	TOTAL VALUE OF LOAN		REMARK
	MILLION USD	BILLION Rp.	
IBRD :			
1. East Java Secondary City	62.10	103.02	
Sub Total :	62.10	103.02	
OECD :			
1. Buaran II	83.70	138.86	
2. 100 IKK WSP	14.50	24.06	
Sub Total :	98.20	162.92	

AGENCY / PROJECT	TOTAL VALUE OF LOAN		REMARK
	MILLION USD	BILLION Rp.	
<u>ITALI :</u>			
1. Serang Water Sources	48.00	79.63	
Sub Total :	48.00	79.63	
<u>CIDA :</u>			
1. Kupang & Mataram WSP	10.64	17.65	
Sub Total :	10.64	17.65	
<u>PRIVATE LOAN (Italia + Indonesia) :</u>			
1. UMBULAN WSP.	111.50	184.98	
Sub Total :	111.50	184.98	

LAMPIRAN II

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA SANTUAN
1	110390	D.I. ACEH	KAB. ACEH TIMUR	TUALANG CUT	PERANCIS 100 IKK
2	110390		KAB. ACEH TIMUR	SERUAI	PERANCIS 100 IKK
3	110390		KAB. ACEH TIMUR	SUNGAI YU	PERANCIS 100 IKK
4	110690		KAB. ACEH BESAR	LHOKNGA	PERANCIS 100 IKK
5	110690		KAB. ACEH BESAR	SIBREH	PERANCIS 100 IKK
6	110790		KAB. PIDIE	SIMPANG TIGA	PERANCIS 100 IKK
7	110790		KAB. PIDIE	BEUREUNEN	PERANCIS 100 IKK
8	110790		KAB. PIDIE	LAWEUNG	PERANCIS 100 IKK
9	110790		KAB. PIDIE	GLUMPANG MINYEU/L.P.	PERANCIS 100 IKK
10	110790		KAB. PIDIE	MEUREDU	PERANCIS 100 IKK
11	110808		KAB. ACEH UTARA	LHOK SUKON	PERANCIS 100 IKK
12	110890		KAB. ACEH UTARA	MATANG KULI	PERANCIS 100 IKK
13	110890		KAB. ACEH UTARA	JENUIB	PERANCIS 100 IKK
14	110890		KAB. ACEH UTARA	PEUDADA	PERANCIS 100 IKK
15	110890		KAB. ACEH UTARA	LHOK NIBONG	PERANCIS 100 IKK
16	110890		KAB. ACEH UTARA	KRUENG MANE	PERANCIS 100 IKK
17	120203	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	KOTANOPAN	PERANCIS 100 IKK
18	120590		KAB. LABUHAN BATU	LANGGA PAYUNG	PERANCIS 100 IKK
19	120590		KAB. LABUHAN BATU	NEGRI LANA	PERANCIS 100 IKK
20	130190	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	TERUSAN	PERANCIS 100 IKK
21	130790		KAB. LIMA PULUH KOTA	DAGUNG-DAGUNG	PERANCIS 100 IKK
22	130790		KAB. LIMA PULUH KOTA	TANJUNG PATI	PERANCIS 100 IKK
23	130790		KAB. LIMA PULUH KOTA	PANGKALAN	PERANCIS 100 IKK
24	130890		KAB. PASAMAN	TAPUS	PERANCIS 100 IKK
25	130890		KAB. PASAMAN	UJUNG GADING	PERANCIS 100 IKK
26	140490	RIAU	KAB. KAMPAR	UJUNG BATU	PERANCIS 100 IKK
27	150302	JAMBI	KAB. BATANG HARI	MUARA TEMBESI	PERANCIS 100 IKK
28	160212	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING IL	PAMPANGAN	PERANCIS 100 IKK
29	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	PEDAHARAN	PERANCIS 100 IKK
30	160304		KAB. MUARA ENIM	PRABUMULIH	PERANCIS 100 IKK
31	160306		KAB. MUARA ENIM	TALANG UBI	PERANCIS 100 IKK
32	160390		KAB. MUARA ENIM	BERINGIN	PERANCIS 100 IKK
33	160490		KAB. LAHAT	PENDOPO LINTANG	PERANCIS 100 IKK
34	160590		KAB. MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	PERANCIS 100 IKK
35	160590		KAB. MUSI RAWAS	BINGIN TELUK	PERANCIS 100 IKK
36	160590		KAB. MUSI RAWAS	MUARA BELITI	PERANCIS 100 IKK
37	160590		KAB. MUSI RAWAS	SRI KATON	PERANCIS 100 IKK
38	160690		KAB. MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	PERANCIS 100 IKK
39	160690		KAB. MUSI BANYUASIN	BAYUNG LINCIR	PERANCIS 100 IKK
40	160704		KAB. BANGKA	BELINYU	PERANCIS 100 IKK
41	160712		KAB. BANGKA	TOSCALI	PERANCIS 100 IKK
42	160790		KAB. BANGKA	PARIT TIGA	PERANCIS 100 IKK
43	160803		KAB. BELITUNG	MANGGAR	PERANCIS 100 IKK
44	170190	BENGKULU	KAB. BENGKULU SELATAN	SIMPANG TIGA	PERANCIS 100 IKK
45	170371		KAB. BENGKULU UTARA	BENGKULU	PERANCIS 100 IKK
46	170390		KAB. BENGKULU UTARA	KARANG TINGGI	PERANCIS 100 IKK
47	180190	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	SUKCHARJO	PERANCIS 100 IKK
48	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	SUKADANA	PERANCIS 100 IKK
49	180310		KAB. LAMPUNG UTARA	BLAMBANGAN	PERANCIS 100 IKK
50	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	BUKIT KEMUNING	PERANCIS 100 IKK
51	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	NEGARA RATU	PERANCIS 100 IKK
52	320304	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	CIBUNGBULANG	PERANCIS 100 IKK

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
53	320313		KAB. BOGOR	JONGGOL	PERANCIS 100 IKK
54	320319		KAB. BOGOR	DEPOK	PERANCIS 100 IKK
55	320390		KAB. BOGOR	KEDUNGHALANG	PERANCIS 100 IKK
56	320508		KAB. CIANJUR	CIBEBER	PERANCIS 100 IKK
57	320517		KAB. CIANJUR	PACET	PERANCIS 100 IKK
58	320690		KAB. BANDUNG	CILILIN	PERANCIS 100 IKK
59	320690		KAB. BANDUNG	PAHEUNGPEUK	PERANCIS 100 IKK
60	320690		KAB. BANDUNG	BATUJAJAR	PERANCIS 100 IKK
61	320721		KAB. GARUT	CIBATU	PERANCIS 100 IKK
62	320890		KAB. TASIKMALAYA	BANTAR KALONG	PERANCIS 100 IKK
63	320890		KAB. TASIKMALAYA	RAJAPOLAH	PERANCIS 100 IKK
64	320990		KAB. CIAMIS	KALIPUCANG	PERANCIS 100 IKK
65	321210		KAB. MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	PERANCIS 100 IKK
66	321211		KAB. MAJALENGKA	JATIWANGI	PERANCIS 100 IKK
67	321290		KAB. MAJALENGKA	JATI TUJUH	PERANCIS 100 IKK
68	321407		KAB. INDRAMAYU	KERTASEMAYA	PERANCIS 100 IKK
69	321490		KAB. INDRAMAYU	WIDASARI	PERANCIS 100 IKK
70	321490		KAB. INDRAMAYU	LOHBENER	PERANCIS 100 IKK
71	321805		KAB. BEKASI	TAHBUN	PERANCIS 100 IKK
72	321811		KAB. BEKASI	CIKARANG	PERANCIS 100 IKK
73	321890		KAB. BEKASI	CIBARUSAH	PERANCIS 100 IKK
74	610290	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	SUNGAI RAYA	PERANCIS 100 IKK
75	620290	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KT. WARINGIN TIM	TUMBANG SAMBA	PERANCIS 100 IKK
76	620304		KAB. KATINGAH	KASONGAN	PERANCIS 100 IKK
77	620471		KODYA PALANGKARAYA	PALANGKARAYA	PERANCIS 100 IKK
78	620490		KAB. KAPUAS	PALINGKAU	PERANCIS 100 IKK
79	620490		KAB. KAPUAS	TEWAH	PERANCIS 100 IKK
80	620590		KAB. BARITO SELATAN	BENGKUANG	PERANCIS 100 IKK
81	620590		KAB. BARITO SELATAN	MENGGATIP	PERANCIS 100 IKK
82	620601		KAB. BARITO SELATAN	TAMANG LAYANG	PERANCIS 100 IKK
83	620902		KAB. MURUNG RAYA	PURUKCAHU	PERANCIS 100 IKK
84	630390	KALIMANTAN SELATAN	KAB. BANJAR	SUNGAI TABUK	PERANCIS 100 IKK
85	630410		KAB. BARITO KUALA	MARABAHAN	PERANCIS 100 IKK
86	630590		KAB. TAPIH	DANAU PANGGANG	PERANCIS 100 IKK
87	630590		KAB. TAPIN	BINUANG	PERANCIS 100 IKK
88	630590		KAB. TAPIN	AWAYAN	PERANCIS 100 IKK
89	630690		KAB. HULU SUNGAI SELA	ANGKINANG	PERANCIS 100 IKK
90	630690		KAB. HULU SUNGAI SELA	PASUNGKAN	PERANCIS 100 IKK
91	630690		KAB. HULU SUNGAI SELA	TAMBAK BITIH	PERANCIS 100 IKK
92	630790		KAB. HULU SUNGAI TENG	BIRAYANG	PERANCIS 100 IKK
93	630790		KAB. HULU SUNGAI TENG	PANGAWAN BARU	PERANCIS 100 IKK
94	630890		KAB. HULU SUNGAI UTAR	ALABIC	PERANCIS 100 IKK
95	630890		KAB. HULU SUNGAI UTAR	PARINGIN	PERANCIS 100 IKK
96	630890		KAB. TABALONG	KELUA	PERANCIS 100 IKK
97	640290	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	MUARA KOMAH	PERANCIS 100 IKK
98	640290		KAB. KUTAI	MUARA MUNTAI	PERANCIS 100 IKK
99	640390		KAB. SERAU	TELUK BAYUR	PERANCIS 100 IKK
100	640404		KAB. BULUNGAN	MALINAU KOTA	PERANCIS 100 IKK
101	720201	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	POSO	PERANCIS 100 IKK
102	720290		KAB. POSO	KASIGUNCU	PERANCIS 100 IKK
103	720404		KAB. BUOL TOLI-TOLI	TOLI-TOLI	PERANCIS 100 IKK
104	720490		KAB. BUOL TOLI-TOLI	AMPIBABC	PERANCIS 100 IKK

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
105	720490		KAB. BUOL TOLI-TOLI	LALOS	PERANCIS 100 IKK
106	730403	SULAWESI SELATAN	KAB. JENEPONTO	JENEPONTO	PERANCIS 100 IKK
107	730690		KAB. GOWA	SUNGGUMINASA	PERANCIS 100 IKK
108	730904		KAB. MAROS	MAROS	PERANCIS 100 IKK
109	731504		KAB. PINRANG	PINRANG	PERANCIS 100 IKK
110	13	SUMATERA BARAT		SIMPANG AMPAT	KFW. NO. 85. 65. 207
111	130290		KAB. SOLOK	MUARA PANAS	KFW. NO. 85. 65. 207
112	130474		KAB. TANAH DATAR	PADANG PANJANG	KFW. NO. 85. 65. 207
113	130590		KAB. PADANG PARIAMAN	SICINCIN	KFW. NO. 85. 65. 207
114	130675		KAB. AGAM	BUKIT TINGGI	KFW. NO. 85. 65. 207
115	130690		KAB. AGAM	MANINJAU	KFW. NO. 85. 65. 207
116	130890		KAB. PASAMAN	BONJOL	KFW. NO. 85. 65. 207
117	130890		KAB. PASAMAN	RAO	KFW. NO. 85. 65. 207
118	130571		KAB. PADANG PARIAMAN	PADANG	KFW. NO. 85. 65. 137
119	810190	MALUKU	KAB. MALUKU TENGGARA	LARAT	J - 37. C.
120	810190		KAB. MALUKU TENGGARA	WONRELI	J - 37. C.
121	810190		KAB. MALUKU TENGGARA	SERWARU	J - 37. C.
122	810190		KAB. MALUKU TENGGARA	DOBO	J - 37. C.
123	810217		KAB. MALUKU TENGAH	NAMLEA	J - 37. C.
124	810290		KAB. MALUKU TENGAH	WAHAI	J - 37. C.
125	810290		KAB. MALUKU TENGAH	BULA	J - 37. C.
126	810490		KAB. MALUKU UTARA	GALELA	J - 37. C.
127	810490		KAB. MALUKU UTARA	LABUHA	J - 37. C.
128	810490		KAB. MALUKU UTARA	TOBELO	J - 37. C.
129	120290	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	PENYAHBUNGAN	J - 37 (IKK)
130	120690		KAB. ASAHAN	PEKAN INDRAPURA	J - 37 (IKK)
131	120690		KAB. ASAHAN	SEI ALIM ULU	J - 37 (IKK)
132	120690		KAB. ASAHAN	LIMA PULUH KOTA	J - 37 (IKK)
133	120690		KAB. ASAHAN	SEI SILAU TIMUR	J - 37 (IKK)
134	120690		KAB. ASAHAN	LABUHAN RUKU	J - 37 (IKK)
135	121011		KAB. DELI SERDANG	DOLOK MASIHUL	J - 37 (IKK)
136	121016		KAB. DELI SERDANG	TANJUNG BERINGIN	J - 37 (IKK)
137	121090		KAB. DELI SERDANG	TEMBUNG	J - 37 (IKK)
138	121090		KAB. DELI SERDANG	PANTAI CERMIN	J - 37 (IKK)
139	121107		KAB. LANGKAT	STABAT	J - 37 (IKK)
140	121190		KAB. LANGKAT	GEBANG	J - 37 (IKK)
141	121190		KAB. LANGKAT	TANJUNG SELAMAT	J - 37 (IKK)
142	121190		KAB. LANGKAT	TANJUNG LANGKAT	J - 37 (IKK)
143	121190		KAB. LANGKAT	BESITANG	J - 37 (IKK)
144	320112	JAWA BARAT	KAB. PANDEGLANG	CIMANUK	J - 37 (IKK)
145	320190		KAB. PANDEGLANG	PAGELARAN	J - 37 (IKK)
146	320190		KAB. PANDEGLANG	CADASARI	J - 37 (IKK)
147	320190		KAB. PANDEGLANG	CIBALIUNG	J - 37 (IKK)
148	320190		KAB. PANDEGLANG	CIKEUSIK	J - 37 (IKK)
149	320190		KAB. PANDEGLANG	BOJONG	J - 37 (IKK)
150	320290		KAB. LEBAK	SAJIRA	J - 37 (IKK)
151	320730		KAB. GARUT	SAHARANG	J - 37 (IKK)
152	320818		KAB. TASIKMALAYA	INDIHIANG	J - 37 (IKK)
153	320890		KAB. TASIKMALAYA	KARANG NUNGGAL	J - 37 (IKK)
154	320890		KAB. TASIKMALAYA	CINEAH	J - 37 (IKK)
155	320890		KAB. TASIKMALAYA	MANONJAYA	J - 37 (IKK)
156	320990		KAB. CIAMIS	BANJARSARI	J - 37 (IKK)

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
157	320990		KAB. CIAMIS	PARIGI	J - 37 (IKK)
158	321103		KAB. CIREBON	KARANG SEMBUNG	J - 37 (IKK)
159	321110		KAB. CIREBON	SUMBER	J - 37 (IKK)
160	321190		KAB. CIREBON	WALED	J - 37 (IKK)
161	321204		KAB. MAJALENGKA	TALAGA	J - 37 (IKK)
162	321290		KAB. MAJALENGKA	LIGUNG	J - 37 (IKK)
163	321290		KAB. MAJALENGKA	RAJAGALUH	J - 37 (IKK)
164	321490		KAB. INDRAMAYU	BANGODUA	J - 37 (IKK)
165	321490		KAB. INDRAMAYU	LOSARANG	J - 37 (IKK)
166	321590		KAB. SUBANG	PURWADADI	J - 37 (IKK)
167	321601		KAB. PURWAKARTA	PLERED	J - 37 (IKK)
168	321690		KAB. PURWAKARTA	CAMPAKA	J - 37 (IKK)
169	321790		KAB. KARAWANG	JATISARI	J - 37 (IKK)
170	321790		KAB. KARAWANG	RAWAMERTA	J - 37 (IKK)
171	321790		KAB. KARAWANG	TALAGA SARI	J - 37 (IKK)
172	321890		KAB. BEKASI	LEHAHABANG	J - 37 (IKK)
173	321890		KAB. BEKASI	SETU	J - 37 (IKK)
174	321890		KAB. BEKASI	SUKATANI	J - 37 (IKK)
175	321904		KAB. TANGERANG	LEGOK	J - 37 (IKK)
176	321917		KAB. TANGERANG	TELUK NAGA	J - 37 (IKK)
177	321990		KAB. TANGERANG	PASAR KEMIS	J - 37 (IKK)
178	321990		KAB. TANGERANG	CIKUPA	J - 37 (IKK)
179	321990		KAB. TANGERANG	TIGARAKSA	J - 37 (IKK)
180	321990		KAB. TANGERANG	MAUK	J - 37 (IKK)
181	321990		KAB. TANGERANG	RAJEG	J - 37 (IKK)
182	321990		KAB. TANGERANG	KRONJO	J - 37 (IKK)
183	321990		KAB. TANGERANG	CURUG	J - 37 (IKK)
184	322009		KAB. SERANG	CIKANDE	J - 37 (IKK)
185	322090		KAB. SERANG	ANYER	J - 37 (IKK)
186	322090		KAB. SERANG	MANCAK	J - 37 (IKK)
187	11	D. I. ACEH		GEROGOK	J - 37 (IKK)
188	350104	JAWA TIMUR	KAB. PACITAN	PACITAN	IBRD. 2637 - IND.
189	350190		KAB. PACITAN	PRINGKUKU	IBRD. 2637 - IND.
190	350190		KAB. PACITAN	ARJOSARI	IBRD. 2637 - IND.
191	350190		KAB. PACITAN	NGADIREJO	IBRD. 2637 - IND.
192	350190		KAB. PACITAN	KEBON AGUNG	IBRD. 2637 - IND.
193	350190		KAB. PACITAN	DONOREJO	IBRD. 2637 - IND.
194	350190		KAB. PACITAN	PUNUNG	IBRD. 2637 - IND.
195	350217		KAB. PONOROGO	PONOROGO	IBRD. 2637 - IND.
196	350290		KAB. PONOROGO	SOCKO	IBRD. 2637 - IND.
197	350290		KAB. PONOROGO	KAUMAN	IBRD. 2637 - IND.
198	350290		KAB. PONOROGO	MLARAK	IBRD. 2637 - IND.
199	350290		KAB. PONOROGO	SALONG	IBRD. 2637 - IND.
200	350290		KAB. PONOROGO	JENANGAN	IBRD. 2637 - IND.
201	350311		KAB. TRENGGALEK	TRENGGALEK	IBRD. 2637 - IND.
202	350390		KAB. TRENGGALEK	GANDUSARI	IBRD. 2637 - IND.
203	350390		KAB. TRENGGALEK	WATULIMO	IBRD. 2637 - IND.
204	350390		KAB. TRENGGALEK	PULE	IBRD. 2637 - IND.
205	350390		KAB. TRENGGALEK	BENDOREJO	IBRD. 2637 - IND.
206	350390		KAB. TRENGGALEK	KAMPAK	IBRD. 2637 - IND.
207	350390		KAB. TRENGGALEK	ONGKOC	IBRD. 2637 - IND.
208	350390		KAB. TRENGGALEK	MUJUNGAN	IBRD. 2637 - IND.

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROVINSI	KASUPATEN	NAHA KOTA	DANA BANTUAN
209	350390		KAB. TRENGGALEK	PANGGUL	IBRD. 2637 - IND.
210	350508		KAB. BLITAR	WLENGI	IBRD. 2637 - IND.
211	350590		KAB. BLITAR	GARUH	IBRD. 2637 - IND.
212	350590		KAB. BLITAR	KANISORO	IBRD. 2637 - IND.
213	350590		KAB. BLITAR	TALUH	IBRD. 2637 - IND.
214	350590		KAB. BLITAR	SANAKULON	IBRD. 2637 - IND.
215	350604		KAB. KEDIRI	NGADILUMEN	IBRD. 2637 - IND.
216	350606		KAB. KEDIRI	WATES	IBRD. 2637 - IND.
217	350610		KAB. KEDIRI	GURAH	IBRD. 2637 - IND.
218	350615		KAB. KEDIRI	PURWODADI	IBRD. 2637 - IND.
219	350617		KAB. KEDIRI	PARE	IBRD. 2637 - IND.
220	350690		KAB. KEDIRI	PAPAR	IBRD. 2637 - IND.
221	350690		KAB. KEDIRI	SEMEN	IBRD. 2637 - IND.
222	350690		KAB. KEDIRI	GROGOL	IBRD. 2637 - IND.
223	351111		KAB. BONDOWOSO	BONDOWOSO	IBRD. 2637 - IND.
224	351190		KAB. BONDOWOSO	TAPEN	IBRD. 2637 - IND.
225	351190		KAB. BONDOWOSO	SUKASARI LOR	IBRD. 2637 - IND.
226	351190		KAB. BONDOWOSO	PRAJEKAN LOR	IBRD. 2637 - IND.
227	351190		KAB. BONDOWOSO	TEGALANPEL	IBRD. 2637 - IND.
228	351190		KAB. BONDOWOSO	MAESAN	IBRD. 2637 - IND.
229	351390		KAB. PROBOLINGGO	SUMBER	IBRD. 2637 - IND.
230	351390		KAB. PROBOLINGGO	HARON	IBRD. 2637 - IND.
231	351390		KAB. PROBOLINGGO	SANTARAN	IBRD. 2637 - IND.
232	351390		KAB. PROBOLINGGO	MUNENG	IBRD. 2637 - IND.
233	351390		KAB. PROBOLINGGO	KURIPAN	IBRD. 2637 - IND.
234	351390		KAB. PROBOLINGGO	LECES	IBRD. 2637 - IND.
235	351407		KAB. PASURUAN	WONOREJO	IBRD. 2637 - IND.
236	351411		KAB. PASURUAN	PANDAAN	IBRD. 2637 - IND.
237	351420		KAB. PASURUAN	GRATI	IBRD. 2637 - IND.
238	351421		KAB. PASURUAN	NGULING	IBRD. 2637 - IND.
239	351475		KAB. PASURUAN	PASURUAN	IBRD. 2637 - IND.
240	351490		KAB. PASURUAN	PUSPO	IBRD. 2637 - IND.
241	351490		KAB. PASURUAN	PURWODADI	IBRD. 2637 - IND.
242	351808		KAB. NGANJUK	KERTOSONO	IBRD. 2637 - IND.
243	351810		KAB. NGANJUK	BARON	IBRD. 2637 - IND.
244	351811		KAB. NGANJUK	TANJUNGANOM	IBRD. 2637 - IND.
245	351814		KAB. NGANJUK	BAGOR	IBRD. 2637 - IND.
246	351890		KAB. NGANJUK	PRAMBON	IBRD. 2637 - IND.
247	351890		KAB. NGANJUK	REJOSO	IBRD. 2637 - IND.
248	351890		KAB. NGANJUK	SAWAHAN	IBRD. 2637 - IND.
249	351890		KAB. NGANJUK	GONDANG	IBRD. 2637 - IND.
250	351902		KAB. MADIUN	DOLOPO	IBRD. 2637 - IND.
251	351903		KAB. MADIUN	GEGER	IBRD. 2637 - IND.
252	351990		KAB. MADIUN	SARADAN	IBRD. 2637 - IND.
253	351990		KAB. MADIUN	PLANG KENCENG	IBRD. 2637 - IND.
254	351990		KAB. MADIUN	DAGANGAN	IBRD. 2637 - IND.
255	351990		KAB. MADIUN	CARUSAN	IBRD. 2637 - IND.
256	352190		KAB. NGAWI	HANTINGAN	IBRD. 2637 - IND.
257	352190		KAB. NGAWI	GENENG	IBRD. 2637 - IND.
258	352190		KAB. NGAWI	KEDUNGGALAR	IBRD. 2637 - IND.
259	352190		KAB. NGAWI	KWADUNGAN	IBRD. 2637 - IND.
260	352190		KAB. NGAWI	WIDDAREN	IBRD. 2637 - IND.

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
261	350409		KAB. TULUNG AGUNG	NGUNUT	IBRD. 2275 - IND
262	350410		KAB. TULUNG AGUNG	SUMBER GEMPOL	IBRD. 2275 - IND
263	350414		KAB. TULUNG AGUNG	TULUNG AGUNG	IBRD. 2275 - IND
264	350417		KAB. TULUNG AGUNG	KARANG REJO	IBRD. 2275 - IND
265	350490		KAB. TULUNG AGUNG	CAMPUR DARAT	IBRD. 2275 - IND
266	350490		KAB. TULUNG AGUNG	SENDANG	IBRD. 2275 - IND
267	350705		KAB. MALANG	DAMPIT	IBRD. 2275 - IND
268	350709		KAB. MALANG	TUREN	IBRD. 2275 - IND
269	350713		KAB. MALANG	KEPANJEN	IBRD. 2275 - IND
270	350714		KAB. MALANG	BULULAWANG	IBRD. 2275 - IND
271	350724		KAB. MALANG	SINGOSARI	IBRD. 2275 - IND
272	350725		KAB. MALANG	LAWANG	IBRD. 2275 - IND
273	350728		KAB. MALANG	BATU	IBRD. 2275 - IND
274	350790		KAB. MALANG	DONOMULYO	IBRD. 2275 - IND
275	350790		KAB. MALANG	GONDANGLEGI	IBRD. 2275 - IND
276	350790		KAB. MALANG	SUMBER MANJING	IBRD. 2275 - IND
277	350790		KAB. MALANG	AMPEL GADING	IBRD. 2275 - IND
278	350790		KAB. MALANG	BAHTUR	IBRD. 2275 - IND
279	350790		KAB. MALANG	PAGAK	IBRD. 2275 - IND
280	351190		KAB. BONDOWOSO	PANARUKAN	IBRD. 2275 - IND
281	351202		KAB. SITUBONDO	BESUKI	IBRD. 2275 - IND
282	351290		KAB. SITUBONDO	JATI BANTENG	IBRD. 2275 - IND
283	351290		KAB. SITUBONDO	ARJASA	IBRD. 2275 - IND
284	351290		KAB. SITUBONDO	PANJI	IBRD. 2275 - IND
285	351290		KAB. SITUBONDO	KAPONGAN	IBRD. 2275 - IND
286	351506		KAB. SIDOARJO	TANGGULANGIN	IBRD. 2275 - IND
287	351508		KAB. SIDOARJO	SIDOARJO	IBRD. 2275 - IND
288	351511		KAB. SIDOARJO	KRIAN	IBRD. 2275 - IND
289	351513		KAB. SIDOARJO	TAHAN	IBRD. 2275 - IND
290	351590		KAB. SIDOARJO	TULANGAN	IBRD. 2275 - IND
291	351590		KAB. SIDOARJO	WONOAYU	IBRD. 2275 - IND
292	351610		KAB. MOJOKERTO	BANGSAL	IBRD. 2275 - IND
293	351678		KAB. MOJOKERTO	MOJOKERTO	IBRD. 2275 - IND
294	351690		KAB. MOJOKERTO	DAWARBLANDONG	IBRD. 2275 - IND
295	351690		KAB. MOJOKERTO	PURI	IBRD. 2275 - IND
296	351690		KAB. MOJOKERTO	TROWULAN	IBRD. 2275 - IND
297	351690		KAB. MOJOKERTO	NGORO	IBRD. 2275 - IND
298	351977		KAB. MADIUN	MADIUN	IBRD. 2275 - IND
299	352313		KAB. TUBAN	TUBAN	IBRD. 2275 - IND
300	352317		KAB. TUBAN	TAHBAKBOYO	IBRD. 2275 - IND
301	352318		KAB. TUBAN	JATIROGO	IBRD. 2275 - IND
302	352390		KAB. TUBAN	PLUMPANG	IBRD. 2275 - IND
303	352390		KAB. TUBAN	SOKCSARI	IBRD. 2275 - IND
304	352703		KAB. SAMPANG	SAMPANG	IBRD. 2275 - IND
305	352704		KAB. SAMPANG	CAMPLONG	IBRD. 2275 - IND
306	352790		KAB. SAMPANG	KEDUNGUNG	IBRD. 2275 - IND
307	352790		KAB. SAMPANG	ROBATAL	IBRD. 2275 - IND
308	352790		KAB. SAMPANG	SUKOBANAH	IBRD. 2275 - IND
309	352790		KAB. SAMPANG	KETAPANG	IBRD. 2275 - IND
310	320290	JAWA BARAT	KAB. LEBAK	WARUNG GUNUNG	DENMARK (51 IKK)
311	320490		KAB. SUKABUMI	WARUNG KIARA	DENMARK (51 IKK)
312	320490		KAB. SUKABUMI	GEGER BITUNG	DENMARK (51 IKK)

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
313	320490		KAB. SUKABUMI	KALAPANUNGGAL	DENMARK (51 IKK)
314	320490		KAB. SUKABUMI	CIKEMBAR	DENMARK (51 IKK)
315	320490		KAB. SUKABUMI	CISOLOK	DENMARK (51 IKK)
316	320490		KAB. SUKABUMI	NAGRAK	DENMARK (51 IKK)
317	320511		KAB. CIANJUR	WARUNG KONDANG	DENMARK (51 IKK)
318	320590		KAB. CIANJUR	CIKALONG KULON	DENMARK (51 IKK)
319	320590		KAB. CIANJUR	PAGELARAN	DENMARK (51 IKK)
320	320590		KAB. CIANJUR	SUKANEGARA	DENMARK (51 IKK)
321	320590		KAB. CIANJUR	BOJONG PICUNG	DENMARK (51 IKK)
322	320790		KAB. GARUT	BANYURESHI	DENMARK (51 IKK)
323	320790		KAB. GARUT	CISURUPAN	DENMARK (51 IKK)
324	320790		KAB. GARUT	LEUWIGOONG	DENMARK (51 IKK)
325	320790		KAB. GARUT	KARANG PAWITAN	DENMARK (51 IKK)
326	320890		KAB. TASIKHALAYA	CIKALONG	DENMARK (51 IKK)
327	320890		KAB. TASIKHALAYA	KAWALU	DENMARK (51 IKK)
328	320890		KAB. TASIKHALAYA	LEUWISARI	DENMARK (51 IKK)
329	320890		KAB. TASIKHALAYA	CIBALONG	DENMARK (51 IKK)
330	321305		KAB. SUMEDANG	WADO	DENMARK (51 IKK)
331	321312		KAB. SUMEDANG	CIMALAKA	DENMARK (51 IKK)
332	321390		KAB. SUMEDANG	PASEH	DENMARK (51 IKK)
333	321390		KAB. SUMEDANG	SITURAJA	DENMARK (51 IKK)
334	321390		KAB. SUMEDANG	UJUNG JAYA	DENMARK (51 IKK)
335	321390		KAB. SUMEDANG	TCMO	DENMARK (51 IKK)
336	321502		KAB. SUBANG	CISALAK	DENMARK (51 IKK)
337	321504		KAB. SUBANG	KALIJATI	DENMARK (51 IKK)
338	321590		KAB. SUBANG	COMPRENG	DENMARK (51 IKK)
339	321590		KAB. SUBANG	BLAHAKAN	DENMARK (51 IKK)
340	321590		KAB. SUBANG	SEGALAHERANG	DENMARK (51 IKK)
341	321590		KAB. SUBANG	JALAN CAGAK	DENMARK (51 IKK)
342	321590		KAB. SUBANG	CIPUNEGARA	DENMARK (51 IKK)
343	321590		KAB. SUBANG	BIHONG	DENMARK (51 IKK)
344	321790		KAB. KARAWANG	BATUJAYA	DENMARK (51 IKK)
345	321790		KAB. KARAWANG	LEMAHABANG	DENMARK (51 IKK)
346	322023		KAB. SERANG	CIOMAS	DENMARK (51 IKK)
347	322090		KAB. SERANG	KASEMEN	DENMARK (51 IKK)
348	322090		KAB. SERANG	KRAGILAN	DENMARK (51 IKK)
349	322090		KAB. SERANG	PADARINCANG	DENMARK (51 IKK)
350	322090		KAB. SERANG	PABUARAN	DENMARK (51 IKK)
351	322090		KAB. SERANG	WALANTAKA	DENMARK (51 IKK)
352	322090		KAB. SERANG	PAHARAYAN	DENMARK (51 IKK)
353	320673		KAB. BANDUNG	BANDUNG	ADB. 768 - INO
354	160190	SUHATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING UL	PENINJAUAN	ADB. 731 - INO
355	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	KURUNGAN NYAWA	ADB. 731 - INO
356	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	SIMPANG	ADB. 731 - INO
357	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	CEMPAKA	ADB. 731 - INO
358	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	BANDING AGUNG	ADB. 731 - INO
359	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	SIMPANG BENDER	ADB. 731 - INO
360	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	MUARA DUA KISAM	ADB. 731 - INO
361	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	PENYANDINGAN	ADB. 731 - INO
362	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	PULAU BERINGIN	ADB. 731 - INO
363	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	PEMATANG PANGGANG	ADB. 731 - INO
364	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	TANJUNG BATU	ADB. 731 - INO

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DAHA BANTUAN
365	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	TULUNG SELAPAN	ADB. 731 - INO
366	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	SIRAH PULAU PADANG	ADB. 731 - INO
367	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	TANJUNG LUBUK	ADB. 731 - INO
368	160307		KAB. MUARA ENIM	GELUMBANG	ADB. 731 - INO
369	160390		KAB. MUARA ENIM	BABAT	ADB. 731 - INO
370	160390		KAB. MUARA ENIM	RAMBANG BANGKU	ADB. 731 - INO
371	160390		KAB. MUARA ENIM	UJAN MAS BARU	ADB. 731 - INO
372	160390		KAB. MUARA ENIM	TEMPIRAI	ADB. 731 - INO
373	160390		KAB. MUARA ENIM	AIR ITAM	ADB. 731 - INO
374	160390		KAB. MUARA ENIM	PULAU PANGGUNG	ADB. 731 - INO
375	160490		KAB. LAHAT	ARAHAN	ADB. 731 - INO
375	160490		KAB. LAHAT	MUARA PINANG	ADB. 731 - INO
377	160490		KAB. LAHAT	JARAI	ADB. 731 - INO
378	160490		KAB. LAHAT	BUNGA MAS	ADB. 731 - INO
379	160490		KAB. LAHAT	TERKUL	ADB. 731 - INO
380	160490		KAB. LAHAT	PADANG TEPONG	ADB. 731 - INO
381	160507		KAB. MUSI RAWAS	MUARA RUPIT	ADB. 731 - INO
382	160590		KAB. MUSI RAWAS	SUROLANGUN	ADB. 731 - INO
383	160590		KAB. MUSI RAWAS	TERAWAS	ADB. 731 - INO
384	160590		KAB. MUSI RAWAS	MUARA LAKITAN	ADB. 731 - INO
385	160590		KAB. MUSI RAWAS	JAYALOKA	ADB. 731 - INO
386	160690		KAB. MUSI BANYUASIN	SUNGAI LILIN	ADB. 731 - INO
387	160690		KAB. MUSI BANYUASIN	SUNGGANG	ADB. 731 - INO
388	160690		KAB. MUSI BANYUASIN	SUKARAMI	ADB. 731 - INO
389	160790		KAB. BANGKA	MANGKEL	ADB. 731 - INO
390	160790		KAB. BANGKA	JEBUS	ADB. 731 - INO
391	160790		KAB. BANGKA	KOBA	ADB. 731 - INO
392	160790		KAB. BANGKA	SUNGAI SELAN	ADB. 731 - INO
393	160790		KAB. BANGKA	TANJUNG LEBU	ADB. 731 - INO
394	160790		KAB. BANGKA	BATURUSA	ADB. 731 - INO
395	160790		KAB. BANGKA	PAYUNG	ADB. 731 - INO
396	160790		KAB. BANGKA	KELAPA	ADB. 731 - INO
397	160803		KAB. BELITUNG	SELAT MASIK	ADB. 731 - INO
398	160890		KAB. BELITUNG	MEMBALONG	ADB. 731 - INO
399	160890		KAB. BELITUNG	DENDANG	ADB. 731 - INO
400	180190	LAMPUNG	KAB. LAMPUNG SELATAN	GADING REJO	ADB. 731 - INO
401	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	TALANG JAWA	ADB. 731 - INO
402	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	AMBARAWA	ADB. 731 - INO
403	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	PADANG CERMIN	ADB. 731 - INO
404	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	TANJUNG RATU	ADB. 731 - INO
405	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	PAGELARAN	ADB. 731 - INO
406	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	PARDASUKA	ADB. 731 - INO
407	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	AIR NANINGAM	ADB. 731 - INO
408	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	BANGUNAN	ADB. 731 - INO
409	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	KATIBUNG	ADB. 731 - INO
410	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	JATI BARU	ADB. 731 - INO
411	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	BANYUMAS	ADB. 731 - INO
412	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	ATAP BERAK	ADB. 731 - INO
413	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	GEDONG TATAAN	ADB. 731 - INO
414	180190		KAB. LAMPUNG SELATAN	ADI LUWIH	ADB. 731 - INO
415	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	SUMBER GEDE	ADB. 731 - INO
416	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	TANJUNG HARAPAN	ADB. 731 - INO

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
417	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	FAJAR MATARAM	ADB. 731 - INO
418	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	GAYA BARU 1,2	ADB. 731 - INO
419	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	SUMSER WARINGIN	ADB. 731 - INO
420	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	WONOSOKO	ADB. 731 - INO
421	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	TAMAN FAJAR	ADB. 731 - INO
422	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	RAMA GUNAWAN	ADB. 731 - INO
423	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	TANGGUL ANGIN	ADB. 731 - INO
424	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	NEGARA BATIN	ADB. 731 - INO
425	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	BRAJA SAKTI	ADB. 731 - INO
426	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	RETNO BASUKI	ADB. 731 - INO
427	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	PADANG RATU	ADB. 731 - INO
428	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	MENGANDUNG SARI	ADB. 731 - INO
429	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	RAMAN UTARA	ADB. 731 - INO
430	180290		KAB. LAMPUNG TENGAH	BATANG HARJO	ADB. 731 - INO
431	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	BUMI AGUNG MARGA	ADB. 731 - INO
432	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	TIUH BALAK	ADB. 731 - INO
433	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	BUMI AGUNG WARAS	ADB. 731 - INO
434	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	SERDANG PURING	ADB. 731 - INO
435	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	TULUNG BALAE	ADB. 731 - INO
436	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	SUKA BUMI	ADB. 731 - INO
437	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	KETAPANG	ADB. 731 - INO
438	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	SUMBER JAYA	ADB. 731 - INO
439	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	WIPALAGA	ADB. 731 - INO
440	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	TANJUNG RAJA	ADB. 731 - INO
441	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	PANARAGAN	ADB. 731 - INO
442	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	PASAR BANJIT	ADB. 731 - INO
443	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	MERAMBUNG	ADB. 731 - INO
444	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	KASUI PASAR	ADB. 731 - INO
445	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	KARTA	ADB. 731 - INO
446	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	MESIR ILIR	ADB. 731 - INO
447	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	MADUKORO	ADB. 731 - INO
448	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	CANDI MAS	ADB. 731 - INO
449	180390		KAB. LAMPUNG UTARA	BATU RAJA	ADB. 731 - INO
450	330190	JAWA TENGAH	KAB. CILACAP	CIMANGGU	ADB. 731 - INO
451	330190		KAB. CILACAP	CILEMPUYANG	ADB. 731 - INO
452	330217		KAB. BANYUMAS	CILONGOK	ADB. 731 - INO
453	330290		KAB. BANYUMAS	KEDUNGSANTENG	ADB. 731 - INO
454	330490		KAB. BANJARNEGARA	BAWANG	ADB. 731 - INO
455	331190		KAB. SUKOHARJO	MRAKGGAN	ADB. 731 - INO
456	331190		KAB. SUKOHARJO	KETEGUHAN	ADB. 731 - INO
457	331190		KAB. SUKOHARJO	MOJOREJO	ADB. 731 - INO
458	331390		KAB. KARANGANYAR	MALANG JIWAN	ADB. 731 - INO
459	331510		KAB. GROBOGAN	WIROSARI	ADB. 731 - INO
460	331516		KAB. GROBOGAN	GONDONG	ADB. 731 - INO
461	331590		KAB. GROBOGAN	KUWU	ADB. 731 - INO
462	331590		KAB. GROBOGAN	NGARINGAN	ADB. 731 - INO
463	331590		KAB. GROBOGAN	KLAMBU	ADB. 731 - INO
464	331590		KAB. GROBOGAN	SULURSARI	ADB. 731 - INO
465	331612		KAB. BLORA	NGAWEN	ADB. 731 - INO
466	331613		KAB. BLORA	KUNDURAN	ADB. 731 - INO
467	331690		KAB. BLORA	RANDU BLATUNG	ADB. 731 - INO
468	331690		KAB. BLORA	KEDUNGTUBAH	ADB. 731 - INO

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
469	331790		KAB. REMBANG	SARANG	ADB. 731 - INO
470	331790		KAB. REMBANG	PAHOTAN	ADB. 731 - INO
471	331890		KAB. PATI	TAMBRAKROMO	ADB. 731 - INO
472	331890		KAB. PATI	KAYEN	ADB. 731 - INO
473	331890		KAB. PATI	GABUS	ADB. 731 - INO
474	331907		KAB. KUDUS	BAE	ADB. 731 - INO
475	331990		KAB. KUDUS	UNDAAN KIDUL	ADB. 731 - INO
476	331990		KAB. KUDUS	GONDOSARI	ADB. 731 - INO
477	332090		KAB. JEPARA	JAMBU	ADB. 731 - INO
478	332190		KAB. DEMAK	HIJEN	ADB. 731 - INO
479	332190		KAB. DEMAK	KARANG ANYAR	ADB. 731 - INO
480	332590		KAB. SATANG	BLADD	ADB. 731 - INO
481	332590		KAB. PEKALONGAN	DORO	ADB. 731 - INO
482	332590		KAB. PEKALONGAN	ROWO KEMBU	ADB. 731 - INO
483	332590		KAB. PEKALONGAN	TALUN	ADB. 731 - INO
484	332590		KAB. PEKALONGAN	KESESI	ADB. 731 - INO
485	332590		KAB. PEKALONGAN	KAJEN	ADB. 731 - INO
486	332703		KAB. PEMALANG	BELIK	ADB. 731 - INO
487	332707		KAB. PEMALANG	RANDU DCNGKAL	ADB. 731 - INO
488	332790		KAB. PEMALANG	MOGA	ADB. 731 - INO
489	332790		KAB. PEMALANG	KARANG MONCCL	ADB. 731 - INO
490	332790		KAB. PEMALANG	PULOSARI	ADB. 731 - INO
491	332890		KAB. TEGAL	JATI NEGARA	ADB. 731 - INO
492	332990		KAB. BREBES	KETANGGUNGAN	ADB. 731 - INO
493	332990		KAB. BREBES	LARANGAN	ADB. 731 - INO
494	332990		KAB. BREBES	WANASARI	ADB. 731 - INO
495	332990		KAB. BREBES	BANJAR HARJO	ADB. 731 - INO
496	340190	D. I. YOGYAKARTA	KAB. KULONPROGO	KANOMAN	ADB. 731 - INO
497	340190		KAB. KULONPROGO	HARGOWILIS	ADB. 731 - INO
498	340190		KAB. KULONPROGO	TEMON	ADB. 731 - INO
499	340190		KAB. KULONPROGO	GIRIMULYO	ADB. 731 - INO
500	340190		KAB. KULONPROGO	BENDUNGAN	ADB. 731 - INO
501	340210		KAB. BANTUL	INGGIRI	ADB. 731 - INO
502	340290		KAB. BANTUL	TRIHARJO/WIJIHA	ADB. 731 - INO
503	340290		KAB. BANTUL	DCNOTIRTO	ADB. 731 - INO
504	340290		KAB. BANTUL	PIYUNGAN	ADB. 731 - INO
505	340290		KAB. BANTUL	SEWON	ADB. 731 - INO
506	340290		KAB. BANTUL	PUNDONG	ADB. 731 - INO
507	340290		KAB. BANTUL	MULYODADI	ADB. 731 - INO
508	340290		KAB. BANTUL	ARGOREJO/ARGOSA	ADB. 731 - INO
509	340290		KAB. BANTUL	PLERET	ADB. 731 - INO
510	340290		KAB. BANTUL	SANDEH	ADB. 731 - INO
511	340290		KAB. BANTUL	SUMBER AGUNG	ADB. 731 - INO
512	340390		KAB. GUNUNG KIDUL	KEMIJING/SEMIN	ADB. 731 - INO
513	340390		KAB. GUNUNG KIDUL	PRINGOMBO	ADB. 731 - INO
514	340390		KAB. GUNUNG KIDUL	SIDOHARJO	ADB. 731 - INO
515	340390		KAB. GUNUNG KIDUL	SUMBEREJO	ADB. 731 - INO
516	340390		KAB. GUNUNG KIDUL	NGLIPAR	ADB. 731 - INO
517	340490		KAB. SLEMAN	AMBAR KETAWANG	ADB. 731 - INO
518	340490		KAB. SLEMAN	SENDANGREJO	ADB. 731 - INO
519	340490		KAB. SLEMAN	TEGALTIRTO	ADB. 731 - INO
520	340490		KAB. SLEMAN	TRIHARJO	ADB. 731 - INO

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA SANTUAN
521	340490		KAB. SLEMAN	DONJERTO	ADB. 731 - INO
522	340490		KAB. SLEMAN	SUMBER AGUNG	ADB. 731 - INO
523	340490		KAB. SLEMAN	WIDDOMARTANI	ADB. 731 - INO
524	340490		KAB. SLEMAN	SOKOHARJO	ADB. 731 - INC
525	340490		KAB. SLEMAN	BIHANGAN	ADB. 731 - INO
526	330219	JAWA TENGAH	KAB. BANYUMAS	PURWOKERTO	ADB. 629 - INO
527	330220		KAB. BANYUMAS	SOKARAJA	ADB. 629 - INO
528	330606		KAB. PURWOREJO	PURWOREJO	ADB. 629 - INO
529	330871		KAB. MAGELANG	MAGELANG	ADB. 629 - INO
530	331007		KAB. KLATEN	KLATEN	ADB. 629 - INO
531	331212		KAB. WONOGIRI	WONOGIRI	ADB. 629 - INO
532	331513		KAB. GROBOGAN	PURWODADI	ADB. 629 - INC
533	331810		KAB. PATI	PATI	ADB. 629 - INO
534	332112		KAB. DEMAK	DEMAK	ADB. 629 - INO
535	332215		KAB. SEMARANG	UNGARAN	ADB. 629 - INO
536	332417		KAB. KENDAL	KENDAL	ADB. 629 - INO
537	332590		KAB. PEKALONGAN	WIRCODESO	ADB. 629 - INO
538	332708		KAB. PEMALANG	PEMALANG	ADB. 629 - INO
539	332876		KAB. TEGAL	TEGAL	ADB. 629 - INO
540	332890		KAB. TEGAL	SLAWI	ADB. 629 - INC
541	332916		KAB. BREBES	BREBES	ADB. 629 - INO
542	121075	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	MEDAN	ADB. 550 - INO
543	332273	JAWA TENGAH	KODYA SEMARANG	SEMARANG	ADB. 547 - INC
544	160106	SUMATERA SELATAN	KAB. OGAN KOMERING UL	MARTAPURA	ADB. 473 - INO
545	160190		KAB. OGAN KOMERING UL	GUMAYANG	ADB. 473 - INC
546	160205		KAB. OGAN KOMERING IL	KAYU AGUNG	ADB. 473 - INC
547	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	MUARA DUA	ADB. 473 - INO
548	160290		KAB. OGAN KOMERING IL	TANJUNG RAYA	ADB. 473 - INO
549	160302		KAB. MUARA ENIM	TANJUNG ENIM	ADB. 473 - INO
550	160402		KAB. LAHAT	PAGAR ALAM	ADB. 473 - INO
551	160406		KAB. LAHAT	TEBING TINGGI	ADB. 473 - INO
552	160411		KAB. LAHAT	LAHAT	ADB. 473 - INO
553	160890		KAB. MUSI BANYUASIN	BETUNG	ADB. 473 - INO
554	160790		KAB. BANGKA	MENTOK	ADB. 473 - INC
555	330115	JAWA TENGAH	KAB. CILACAP	MAJENANG	ADB. 473 - INC
556	330211		KAB. BANYUMAS	BANYUMAS	ADB. 473 - INO
557	330290		KAB. BANYUMAS	WANGON	ADB. 473 - INO
558	330305		KAB. PURBOLINGGO	PURBOLINGGO	ADB. 473 - INO
559	330519		KAB. KESUMEN	GOMBONG	ADB. 473 - INO
560	330808		KAB. MAGELANG	MUNTILAN	ADB. 473 - INO
561	330905		KAB. BOYOLALI	BOYOLALI	ADB. 473 - INO
562	331001		KAB. KLATEN	PRAMBANAN	ADB. 473 - INO
563	331104		KAB. SUKCHARJO	SUKCHARJO	ADB. 473 - INO
564	331190		KAB. SUKOHARJO	KARTOSURO	ADB. 473 - INO
565	331605		KAB. BLORA	CEPU	ADB. 473 - INO
566	331609		KAB. BLORA	BLORA	ADB. 473 - INO
567	331710		KAB. REMBANG	REMBANG	ADB. 473 - INO
568	332006		KAB. JEPARA	JEPARA	ADB. 473 - INO
569	332210		KAB. SEMARANG	AMBARAWA	ADB. 473 - INO
570	332273		KAB. SEMARANG	SALATIGA	ADB. 473 - INO
571	332303		KAB. TEMANGGUNG	TEMANGGUNG	ADB. 473 - INO
572	332414		KAB. KENDAL	WALERI	ADB. 473 - INO

DAFTAR KOTA-KOTA LANJUTAN DARI PELITA IV

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
573	332675		KAB. PEKALONGAN	PEKALONGAN	ADB. 473 - INO
574	820101	IRIAN JAYA	KAB. MERAUKE	MERAUKE	
575	820205		KAB. JAYAWIJAYA	WAMENA	
576	820306		KAB. KOTIP JAYAPURA	JAYAPURA	
577	820401		KAB. PANIAI	HABIRE	
578	820503		KAB. FAK FAK	FAK FAK	
579	820505		KAB. FAK FAK	MIMIKA TIMUR	
580	820601		KAB. SORONG	SORONG	
581	820701		KAB. MANOKWARI	MANOKWARI	
582	820806		KAB. YAPEN WAROPEN	SERUI	
583	820911		KAB. TELUK CENDRAWASI	BIAK	

LAMPIRAN III

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA SEGERA DISETUJUI

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
1	121075	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	MEDAN	ADB (MCDR II)
2	170371	BENGKULU	KAB. BENGKULU UTARA	BENGKULU	BENGKULU WSP GERMAN
3	320317	JAWA BARAT	KAB. BOGOR	CIBINONG/CITEUREUP	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
4	320390		KAB. BOGOR	CIAWI	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
5	320414		KAB. SUKABUMI	CIBADAK	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
6	320421		KAB. SUKABUMI	CICURUG	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
7	320514		KAB. CIANJUR	CIRANJANG	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
8	320601		KAB. BANDUNG	CIWIDEY	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
9	320673		KAB. BANDUNG	BANDUNG	BELANDA (LCC SAWS II)
10	320690		KAB. BANDUNG	PANGALENGAN	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
11	320890		KAB. TASIKMALAYA	CIBEUREUM	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
12	321190		KAB. CIREBON	PALIMAHAN	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
13	321213		KAB. MAJALENGKA	KADIPATEN	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
14	321416		KAB. INDRAMAYU	KANDANGHAUR	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
15	321590		KAB. SUBANG	CIASEN	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
16	322090		KAB. SERANG	MERAK	J-30.D. (17 TOWNS WJ)
17	520490	NUSA TENGGARA BARAT	KAB. SUMBAWA	EMPANG	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
18	520490		KAB. SUMBAWA	LENANGGUAR	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
19	520490		KAB. SUMBAWA	MOYO	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
20	520490		KAB. SUMBAWA	PLAMPANG	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
21	520490		KAB. SUMBAWA	SETELUK	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
22	520490		KAB. SUMBAWA	LAPE	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
23	520490		KAB. SUMBAWA	LOPOK	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
24	520608		KAB. BIMA	CENGGU	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
25	520690		KAB. BIMA	TENTE	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
26	520690		KAB. BIMA	MARIA	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
27	520690		KAB. BIMA	TAWALI	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
28	520690		KAB. BIMA	TANGGA	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
29	520690		KAB. BIMA	O'O	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
30	530990	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. SIKKA	TALIBURA	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
31	530990		KAB. SIKKA	WAIPARE	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
32	530990		KAB. SIKKA	PAGA	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
33	530990		KAB. SIKKA	NELLE	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
34	530990		KAB. SIKKA	LELA	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
35	531190		KAB. NGADA	BOLA	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
36	531210		KAB. MANGGARAI	REC	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
37	531290		KAB. MANGGARAI	MANO	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
38	531290		KAB. MANGGARAI	BORONG	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
39	531290		KAB. MANGGARAI	ITENG	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
40	531290		KAB. MANGGARAI	PAGAL	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
41	531290		KAB. MANGGARAI	CANCAR	25IKK NTB-NTT (AUSTR)
42	710112	SULAWESI UTARA	KAB. GORONTALO	TELAGA	IBRD. (SCUDP)
43	710113		KAB. GORONTALO	LIMBOTO	IBRD. (SCUDP)
44	710171		KAB. GORONTALO	GORONTALO	IBRD. (SCUDP)
45	710190		KAB. GORONTALO	MARISA	IBRD. (SCUDP)
46	710190		KAB. GORONTALO	MELONGUANE	IBRD. (SCUDP)
47	710190		KAB. GORONTALO	MOLCHBULAHE	IBRD. (SCUDP)
48	710190		KAB. GORONTALO	TAPA	IBRD. (SCUDP)
49	710190		KAB. GORONTALO	SUWAWA	IBRD. (SCUDP)
50	710190		KAB. GORONTALO	TILAHUTA	IBRD. (SCUDP)
51	710190		KAB. GORONTALO	KABILA	IBRD. (SCUDP)
52	710190		KAB. GORONTALO	BILUNGELA	IBRD. (SCUDP)

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA SEGERA DISETUJUI

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
53	710212		KAB. S. MONGONDOW	KOTA MUBAGO	IBRD. (SCUDP)
54	710290		KAB. B. MONGONDOW	TARA-TARA	IBRD. (SCUDP)
55	710290		KAB. S. MONGONDOW	MODAYAG	IBRD. (SCUDP)
56	710290		KAB. B. MONGONDOW	POOPO	IBRD. (SCUDP)
57	710290		KAB. B. MONGONDOW	IMANDI	IBRD. (SCUDP)
58	710290		KAB. S. MONGONDOW	INOSCHTO	IBRD. (SCUDP)
59	710290		KAB. B. MONGONDOW	MAELANG	IBRD. (SCUDP)
60	710290		KAB. S. MONGONDOW	KOTABUNAH	IBRD. (SCUDP)
61	710290		KAB. S. MONGONDOW	LOLAH	IBRD. (SCUDP)
62	710290		KAB. B. MONGONDOW	PONTAK	IBRD. (SCUDP)
63	710318		KAB. MINAHASA	TOMOHON	IBRD. (SCUDP)
64	710319		KAB. MINAHASA	TONDANO	IBRD. (SCUDP)
65	710390		KAB. MINAHASA	BELANG	IBRD. (SCUDP)
66	710390		KAB. MINAHASA	TATELU	IBRD. (SCUDP)
67	710390		KAB. MINAHASA	TOMPASO	IBRD. (SCUDP)
68	710390		KAB. MINAHASA	KAKAS	IBRD. (SCUDP)
69	710390		KAB. MINAHASA	AIR MADIDI	IBRD. (SCUDP)
70	710390		KAB. MINAHASA	METOLING	IBRD. (SCUDP)
71	710390		KAB. MINAHASA	PINASUNGKULAN	IBRD. (SCUDP)
72	710390		KAB. MINAHASA	TUMPAAN	IBRD. (SCUDP)
73	710390		KAB. MINAHASA	TENGA	IBRD. (SCUDP)
74	710408		KAB. SANGIHE TALAUD	TAHUNA	IBRD. (SCUDP)
75	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	BUHIAS	IBRD. (SCUDP)
76	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	KANDAHE	IBRD. (SCUDP)
77	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	TAMAKO	IBRD. (SCUDP)
78	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	BEO	IBRD. (SCUDP)
79	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	DOLCOUC	IBRD. (SCUDP)
80	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	MANGANITU	IBRD. (SCUDP)
81	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	KUMA	IBRD. (SCUDP)
82	710490		KAB. SANGIHE TALAUD	LIRUNG	IBRD. (SCUDP)
83	730202	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	BULU KUMBA	IBRD. (SCUDP)
84	730290		KAB. BULUKUMBA	TANAH BERU	IBRD. (SCUDP)
85	730290		KAB. BULUKUMBA	TANATEA	IBRD. (SCUDP)
86	730290		KAB. BULUKUMBA	PONRE	IBRD. (SCUDP)
87	730290		KAB. BULUKUMBA	HILA HILA	IBRD. (SCUDP)
88	730302		KAB. BANTAENG	BANTAENG	IBRD. (SCUDP)
89	730390		KAB. BANTAENG	ULUGALUNG	IBRD. (SCUDP)
90	730390		KAB. BANTAENG	BANYORANG	IBRD. (SCUDP)
91	730403		KAB. JENEPONTO	JENEPONTO	IBRD. (SCUDP)
92	730490		KAB. JENEPONTO	WATAN RAPPANG	IBRD. (SCUDP)
93	730490		KAB. JENEPONTO	LEJANG	IBRD. (SCUDP)
94	730490		KAB. JENEPONTO	TANRUTEDONG	IBRD. (SCUDP)
95	730490		KAB. JENEPONTO	SOGERI	IBRD. (SCUDP)
96	730490		KAB. JENEPONTO	BARANTI	IBRD. (SCUDP)
97	730503		KAB. TAKALAR	CANREGO	IBRD. (SCUDP)
98	730590		KAB. TAKALAR	CILALLANG	IBRD. (SCUDP)
99	730671		KAB. GOWA	UJUNG PANDANG	OECF IP - 317
100	730690		KAB. GOWA	CAMBAYA	IBRD. (SCUDP)
101	730690		KAB. GOWA	HALING	IBRD. (SCUDP)
102	730690		KAB. GOWA	SUNGGUMINASA	IBRD. (SCUDP)
103	730690		KAB. GOWA	TAMALLAENG	IBRD. (SCUDP)
104	730690		KAB. GOWA	LIMBUNG	IBRD. (SCUDP)

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA SEGERA DISETUJUI

NO	CODE	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
105	730816		KAB. BONE	WATANPONE	IBRD. (SCUDP)
106	730890		KAB. BONE	TOKESANG	IBRD. (SCUDP)
107	730890		KAB. BONE	PALATTAE	IBRD. (SCUDP)
108	730890		KAB. BONE	PATTIROBOJO	IBRD. (SCUDP)
109	730890		KAB. BONE	TACIPPI	IBRD. (SCUDP)
110	730890		KAB. BONE	GAMMING	IBRD. (SCUDP)
111	730890		KAB. BONE	BALANGE	IBRD. (SCUDP)
112	730890		KAB. BONE	BAJOE	IBRD. (SCUDP)
113	730890		KAB. BONE	BULU TEMPE	IBRD. (SCUDP)
114	730890		KAB. BONE	LALABATA	IBRD. (SCUDP)
115	731103		KAB. BARRU	BARRU	IBRD. (SCUDP)
116	731190		KAB. BARRU	HANGKOSO	IBRD. (SCUDP)
117	731204		KAB. SOPPENG	WATAN SOPPENG	IBRD. (SCUDP)
118	731290		KAB. SOPPENG	TAKALAR	IBRD. (SCUDP)
119	731290		KAB. SOPPENG	TAJUNCU	IBRD. (SCUDP)
120	731290		KAB. SOPPENG	CANGADI	IBRD. (SCUDP)
121	731306		KAB. WAJO	SENGKANG	IBRD. (SCUDP)
122	731390		KAB. WAJO	SIWA	IBRD. (SCUDP)
123	731390		KAB. WAJO	ANNA SANUA	IBRD. (SCUDP)
124	731390		KAB. WAJO	PARIA	IBRD. (SCUDP)
125	731406		KAB. SIDDENRENG RAPP	PANGKAJENE SIDENR	IBRD. (SCUDP)
126	731690		KAB. ENREKANG	CAKKE	IBRD. (SCUDP)
127	731710		KAB. LUWU	WOTU	IBRD. (SCUDP)
128	731790		KAB. LUWU	MAHIPI	IBRD. (SCUDP)
129	731790		KAB. LUWU	LAMASI	IBRD. (SCUDP)
130	731790		KAB. LUWU	PADANING CARPA	IBRD. (SCUDP)
131	731790		KAB. LUWU	BIKERU	IBRD. (SCUDP)
132	731904		KAB. POLEWALIMAMASA	POLIWALI	IBRD. (SCUDP)
133	731990		KAB. POLEWALIMAMASA	WONMULYO	IBRD. (SCUDP)

LAMPIRAN IV

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA MASIH MERUPAKAN INDIKASI

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
1	110190	D. I. ACEH	KAB. ACEH SELATAN	MEUKEUK	OECF. (167 IKK)
2	110290	D. I. ACEH	KAB. ACEH TENGGARA	LAWE SIGALA-GALA	OECF. (167 IKK)
3	110290	D. I. ACEH	KAB. ACEH TENGGARA	BAMBEL	OECF. (167 IKK)
4	110590	D. I. ACEH	KAB. ACEH BARAT	TEUNOM	OECF. (167 IKK)
5	12	SUMATERA UTARA		BATU RAJA	OECF. (167 IKK)
6	120190	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS	HILIWETO	OECF. (167 IKK)
7	120190	SUMATERA UTARA	KAB. NIAS	TOHUMBERUA	OECF. (167 IKK)
8	120290	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	PINTU PADANG	OECF. (167 IKK)
9	120290	SUMATERA UTARA	KAB. TAPANULI SELATAN	SIBUHUAN	OECF. (167 IKK)
10	120590	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU	LANGGA PAYUNG	OECF. (167 IKK)
11	120590	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU	NEGERI LAMA	OECF. (167 IKK)
12	120590	SUMATERA UTARA	KAB. LABUHAN BATU	LABUHAN BILIK	OECF. (167 IKK)
13	120603	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	PULAU RAKYAT	OECF. (167 IKK)
14	120606	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	AIR BATU	OECF. (167 IKK)
15	120690	SUMATERA UTARA	KAB. ASAHAN	SEI KEPAYANG	OECF. (167 IKK)
16	120790	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	SARIMATONDANG	OECF. (167 IKK)
17	120790	SUMATERA UTARA	KAB. SIMALUNGUN	SEI BELAWAN	OECF. (167 IKK)
18	121090	SUMATERA UTARA	KAB. DELI SERDANG	SIPISPIS	OECF. (167 IKK)
19	121190	SUMATERA UTARA	KAB. LANGKAT	SALAPIAN	OECF. (167 IKK)
20	121190	SUMATERA UTARA	KAB. LANGKAT	KUALA	OECF. (167 IKK)
21	130190	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	PASAR KUOK	OECF. (167 IKK)
22	130190	SUMATERA BARAT	KAB. PESISIR SELATAN	TERUSAN	OECF. (167 IKK)
23	130290	SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK	ALAHAM PANJANG	OECF. (167 IKK)
24	130290	SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK	MUARO LABUH	OECF. (167 IKK)
25	130290	SUMATERA BARAT	KAB. SOLOK	KOTA BARU/KUBUNG	OECF. (167 IKK)
26	130490	SUMATERA BARAT	KAB. TANAH DATAR	BUC	OECF. (167 IKK)
27	130490	SUMATERA BARAT	KAB. TANAH DATAR	TABEK PATAH	OECF. (167 IKK)
28	130490	SUMATERA BARAT	KAB. TANAH DATAR	RAMBATAN	OECF. (167 IKK)
29	130504	SUMATERA BARAT	KAB. PADANG PARIAMAN	LUBUK ALUNG	OECF. (167 IKK)
30	130690	SUMATERA BARAT	KAB. AGAM	BIARO	OECF. (167 IKK)
31	130690	SUMATERA BARAT	KAB. AGAM	LUBUK BASUNG	OECF. (167 IKK)
32	130790	SUMATERA BARAT	KAB. LIMA PULUH KOTA	DAGUNG-DAGUNG	OECF. (167 IKK)
33	130790	SUMATERA BARAT	KAB. LIMA PULUH KOTA	AIR TABIK	OECF. (167 IKK)
34	130790	SUMATERA BARAT	KAB. LIMA PULUH KOTA	TANJUNG PATI	OECF. (167 IKK)
35	130890	SUMATERA BARAT	KAB. PASAMAN	TAPUS	OECF. (167 IKK)
36	140390	RIAU	KAB. KEP. RIAU	TANJUNG BATU	OECF. (167 IKK)
37	140390	RIAU	KAB. KEP. RIAU	BELAKANG PADANG	OECF. (167 IKK)
38	140406	RIAU	KAB. KAMPAR	PASIR PANGARAYAN	OECF. (167 IKK)
39	140490	RIAU	KAB. KAMPAR	UJUNG BATU	OECF. (167 IKK)
40	140503	RIAU	KAB. BENGKALIS	SELAT PANJANG	OECF. (167 IKK)
41	140590	RIAU	KAB. BENGKALIS	SEDINGINAH	OECF. (167 IKK)
42	140590	RIAU	KAB. BENGKALIS	TELUK MERBAU	OECF. (167 IKK)
43	140590	RIAU	KAB. BENGKALIS	TELUK BELITUNG	OECF. (167 IKK)
44	150290	JAMBI	KAB. SAROLANGUN	SIULAK DERAS	OECF. (167 IKK)
45	150302	JAMBI	KAB. BATANG HARI	MUARA TEMBESI	OECF. (167 IKK)
46	150303	JAMBI	KAB. BATANG HARI	MUARA BULIAN	OECF. (167 IKK)
47	150390	JAMBI	KAB. BATANG HARI	KEMALI ASAM	OECF. (167 IKK)
48	160306	SUMATERA SELATAN	KAB. MUARA ENIM	TALANG USI	OECF. (167 IKK)
49	160490	SUMATERA SELATAN	KAB. LAHAT	PENDOPO LINTANG	OECF. (167 IKK)
50	160590	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	BINGIN TELUK	OECF. (167 IKK)
51	160590	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	SRI KATCHI	OECF. (167 IKK)
52	160590	SUMATERA SELATAN	KAB. MUSI RAWAS	MUARA BELITI	OECF. (167 IKK)

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA MASIH MERUPAKAN INDIKASI

NO	CODE	PROPINSI	KASUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
53	160590	SUMATERA SELATAN	KAB.MUSI RAWAS	MUARA KELINGI	OECF. (167 IKK)
54	160690	SUMATERA SELATAN	KAB.MUSI BANYUASIN	BABAT TOMAN	OECF. (167 IKK)
55	160890	SUMATERA SELATAN	KAB.MUSI BANYUASIN	BAYUNG LINGIR	OECF. (167 IKK)
56	160704	SUMATERA SELATAN	KAB.BANGKA	BELINYU	OECF. (167 IKK)
57	160712	SUMATERA SELATAN	KAB.BANGKA	TOSOALI	OECF. (167 IKK)
58	160790	SUMATERA SELATAN	KAB.BANGKA	PARIT TIGA	OECF. (167 IKK)
59	160903	SUMATERA SELATAN	KAB.BELITUNG	MANGGAR	OECF. (167 IKK)
60	170371	BENKULU	KAB.BENKULU UTARA	BENKULU	OECF. (167 IKK)
61	180190	LAMPUNG	KAB.LAMPUNG SELATAN	SUKOHARJO	OECF. (167 IKK)
62	180290	LAMPUNG	KAB.LAMPUNG TENGAH	SUKADANA	OECF. (167 IKK)
63	180310	LAMPUNG	KAB.LAMPUNG UTARA	BLAMBANGAN	OECF. (167 IKK)
64	180390	LAMPUNG	KAB.LAMPUNG UTARA	NEGARA RATU	OECF. (167 IKK)
65	180390	LAMPUNG	KAB.LAMPUNG UTARA	BUKIT KEMUNING	OECF. (167 IKK)
66	310000	D.K.I. JAKARTA	KAB.DKI	JAKARTA	IP 308
67	32	JAWA BARAT		CIPEDES	OECF. (167 IKK)
68	320304	JAWA BARAT	KAB.BOGOR	CIBUNGBULANG	OECF. (167 IKK)
69	320390	JAWA BARAT	KAB.BOGOR	CIGOMBONG	OECF. (167 IKK)
70	320390	JAWA BARAT	KAB.BOGOR	RUMPIN	OECF. (167 IKK)
71	320390	JAWA BARAT	KAB.BOGOR	KEDUNGHALANG	OECF. (167 IKK)
72	320490	JAWA BARAT	KAB.SUKABUMI	BUAH DUA	OECF. (167 IKK)
73	320490	JAWA BARAT	KAB.SUKABUMI	NAGRAK	OECF. (167 IKK)
74	320490	JAWA BARAT	KAB.SUKABUMI	KALAPANUNGGAL	OECF. (167 IKK)
75	320508	JAWA BARAT	KAB.CIANJUR	CIBEBER	OECF. (167 IKK)
76	320517	JAWA BARAT	KAB.CIANJUR	PACET	OECF. (167 IKK)
77	320690	JAWA BARAT	KAB.BANDUNG	CILILIN	OECF. (167 IKK)
78	320690	JAWA BARAT	KAB.BANDUNG	SATUJAJAR	OECF. (167 IKK)
79	320790	JAWA BARAT	KAB.GARUT	PAKENJENG	OECF. (167 IKK)
80	320890	JAWA BARAT	KAB.TASIKMALAYA	CIGALONTANG	OECF. (167 IKK)
81	320990	JAWA BARAT	KAB.CIAMIS	BUNISEURI	OECF. (167 IKK)
82	320990	JAWA BARAT	KAB.CIAMIS	CIJULANG	OECF. (167 IKK)
83	320990	JAWA BARAT	KAB.CIAMIS	RAJADESA	OECF. (167 IKK)
84	321210	JAWA BARAT	KAB.MAJALENGKA	LEUWIMUNDING	OECF. (167 IKK)
85	321211	JAWA BARAT	KAB.MAJALENGKA	JATIWANGI	OECF. (167 IKK)
86	321290	JAWA BARAT	KAB.MAJALENGKA	JATI TUJUH	OECF. (167 IKK)
87	321390	JAWA BARAT	KAB.SUMEDANG	CONGGEANG	OECF. (167 IKK)
88	321407	JAWA BARAT	KAB.INDRAHAYU	KERTASEMAYA	OECF. (167 IKK)
89	321490	JAWA BARAT	KAB.INDRAHAYU	WIDASARI	OECF. (167 IKK)
90	321490	JAWA BARAT	KAB.INDRAHAYU	LOHBENER	OECF. (167 IKK)
91	321790	JAWA BARAT	KAB.KARAWANG	KCSANBI	OECF. (167 IKK)
92	321790	JAWA BARAT	KAB.KARAWANG	PANGKALAN	OECF. (167 IKK)
93	321805	JAWA BARAT	KAB.BEKASI	TAMSUN	OECF. (167 IKK)
94	321811	JAWA BARAT	KAB.BEKASI	CIKARANG	OECF. (167 IKK)
95	321890	JAWA BARAT	KAB.BEKASI	CIBARUSAH	OECF. (167 IKK)
96	330603	JAWA TENGAH	KAB.PURWOREJO	PURWODADI	OECF. (167 IKK)
97	331516	JAWA TENGAH	KAB.GROBOGAN	GONDONG	OECF. (167 IKK)
98	331590	JAWA TENGAH	KAB.GROBOGAN	KARANGRAYUNG	OECF. (167 IKK)
99	332190	JAWA TENGAH	KAB.DEMAK	BOHANG	OECF. (167 IKK)
100	332274	JAWA TENGAH	KAB.SEMARANG	SEMARANG	ITALI
101	332412	JAWA TENGAH	KAB.KENDAL	PEGANDON	OECF. (167 IKK)
102	332490	JAWA TENGAH	KAB.KENDAL	MIJEN	OECF. (167 IKK)
103	332490	JAWA TENGAH	KAB.KENDAL	PATEAN	OECF. (167 IKK)
104	332490	JAWA TENGAH	KAB.KENDAL	GEMUH	OECF. (167 IKK)

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA MASIH MERUPAKAN INDIKASI

NO	CODE	PROPINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
105	332512	JAWA TENGAH	KAB. BATANG	WARUNG ASEM	OECF. (167 IKK)
106	351702	JAWA TIMUR	KAB. JOMBANG	GUDDO	OECF. (167 IKK)
107	351708	JAWA TIMUR	KAB. JOMBANG	DIWEK	OECF. (167 IKK)
108	352690	JAWA TIMUR	KAB. BANGKALAN	KOKOP	OECF. (167 IKK)
109	352790	JAWA TIMUR	KAB. SAMPANG	PAKONG	OECF. (167 IKK)
110	352990	JAWA TIMUR	KAB. SUMENEP	GAPURA	OECF. (167 IKK)
111	510304	BALI	KAB. BADUNG	HENGWI	OECF. (167 IKK)
112	510390	BALI	KAB. BADUNG	KESIMAN	OECF. (167 IKK)
113	510590	BALI	KAB. KLUNGKUNG	KUSUMBA	OECF. (167 IKK)
114	510790	BALI	KAB. KARANG ASEM	MENANGA	OECF. (167 IKK)
115	510790	BALI	KAB. KARANG ASEM	PADANG BAI	OECF. (167 IKK)
116	510790	BALI	KAB. KARANG ASEM	ABANG	OECF. (167 IKK)
117	510890	BALI	KAB. JULELENG	SUKASADA	OECF. (167 IKK)
118	510890	BALI	KAB. SULELENG	KLONGING	OECF. (167 IKK)
119	520170	NUSA TENGGARA BARAT		HATARAM	GIDA
120	530370	NUSA TENGGARA TIMUR	KAB. KUPANG	KUPANG	GIDA
121	510190	KALIMANTAN BARAT	KAB. SAMBAS	TEBAS	OECF. (167 IKK)
122	610290	KALIMANTAN BARAT	KAB. PONTIANAK	SEI RAYA	OECF. (167 IKK)
123	520290	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KT. WARINGIN TIM	TUMBANG SAMBA	OECF. (167 IKK)
124	620304	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KATINGAN	KASONGAN	OECF. (167 IKK)
125	620490	KALIMANTAN TENGAH	KAB. KAPUAS	TEWAH	OECF. (167 IKK)
126	620601	KALIMANTAN TENGAH		TAMANG LAYANG	OECF. (167 IKK)
127	620902	KALIMANTAN TENGAH	KAB. MURUNG RAYA	PURUKCAHU	OECF. (167 IKK)
128	640290	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	MUARA MUNTAI	OECF. (167 IKK)
129	640290	KALIMANTAN TIMUR	KAB. KUTAI	MUARA KAMAN	OECF. (167 IKK)
130	640390	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BERAU	TELUK BAYUR	OECF. (167 IKK)
131	640404	KALIMANTAN TIMUR	KAB. BULUNGAN	HALINAU KOTA	OECF. (167 IKK)
132	710190	SULAWESI UTARA	KAB. GORONTALO	BILUNGELA	OECF. (167 IKK)
133	710190	SULAWESI UTARA	KAB. GORONTALO	KABILA	OECF. (167 IKK)
134	710290	SULAWESI UTARA	KAB. B. MONGGONDOW	MODAYAG	OECF. (167 IKK)
135	710290	SULAWESI UTARA	KAB. B. MONGGONDOW	IMANDI	OECF. (167 IKK)
136	710390	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	WORI	OECF. (167 IKK)
137	710390	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	KOMBI	OECF. (167 IKK)
138	710390	SULAWESI UTARA	KAB. MINAHASA	TANA MANGISO	OECF. (167 IKK)
139	710490	SULAWESI UTARA	KAB. SANGIHE TALAUD	ONDONG SIAU	OECF. (167 IKK)
140	710490	SULAWESI UTARA	KAB. SANGIHE TALAUD	HANALU	OECF. (167 IKK)
141	720290	SULAWESI TENGAH	KAB. POSO	KALORONG	OECF. (167 IKK)
142	720308	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	TAWILI	OECF. (167 IKK)
143	720390	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	SABANG	OECF. (167 IKK)
144	720390	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	TOAYA	OECF. (167 IKK)
145	720390	SULAWESI TENGAH	KAB. DONGGALA	BINANGGA	OECF. (167 IKK)
146	720490	SULAWESI TENGAH	KAB. BUOL TOLI-TOLI	KALI	OECF. (167 IKK)
147	730290	SULAWESI SELATAN	KAB. BULUKUMBA	TENUNTING	OECF. (167 IKK)
148	730490	SULAWESI SELATAN	KAB. JENEPONTO	BILOKA	OECF. (167 IKK)
149	730490	SULAWESI SELATAN	KAB. JENEPONTO	ALU	OECF. (167 IKK)
150	730503	SULAWESI SELATAN	KAB. TAKALAR	CANREGG	OECF. (167 IKK)
151	730690	SULAWESI SELATAN	KAB. GOWA	MALAKAJI	OECF. (167 IKK)
152	730890	SULAWESI SELATAN	KAB. BONE	PALAKKA	OECF. (167 IKK)
153	730890	SULAWESI SELATAN	KAB. BONE	SIPPASETUNGE	OECF. (167 IKK)
154	731390	SULAWESI SELATAN	KAB. WAJO	PARIA	OECF. (167 IKK)
155	731690	SULAWESI SELATAN	KAB. ENREKANG	MARANGIN	OECF. (167 IKK)
156	731690	SULAWESI SELATAN	KAB. ENREKANG	BARAKKA	OECF. (167 IKK)

DAFTAR KOTA-KOTA YANG PENDANAANNYA MASIH MERUPAKAN INDIKASI

NO	CODE	PROVINSI	KABUPATEN	NAMA KOTA	DANA BANTUAN
157	731690	SULAWESI SELATAN	KAB. ENREKANG	CAKKE	OECF. (167 IKK)
158	731790	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	BLORA	OECF. (167 IKK)
159	731790	SULAWESI SELATAN	KAB. LUWU	BATUSITANDUK	OECF. (167 IKK)
160	731890	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	RINDINGALO	OECF. (167 IKK)
161	731890	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	GETINGAN	OECF. (167 IKK)
162	731890	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	RANTEPANG	OECF. (167 IKK)
163	731890	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	SULUKAN	OECF. (167 IKK)
164	731890	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	BATAN	OECF. (167 IKK)
165	731890	SULAWESI SELATAN	KAB. TANA TORAJA	ULUSALU	OECF. (167 IKK)
166	731902	SULAWESI SELATAN	KAB. POLEWALIHAMASA	CAMPALAGIAH	OECF. (167 IKK)
167	732102	SULAWESI SELATAN	KAB. MAMUJU	MAMUJU	OECF. (167 IKK)
168	740190	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON	WAHA	OECF. (167 IKK)
169	740190	SULAWESI TENGGARA	KAB. BUTON	AMBEUA	OECF. (167 IKK)
170	740290	SULAWESI TENGGARA	KAB. MUHA	KATOBU	OECF. (167 IKK)